



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten (BKPSDM) Sintang Tahun Anggaran 2019 adalah wajib disusun oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan merupakan tindak lanjut surat Bupati Sintang No.065/0078/ORTAL-B tanggal 9 Januari 2019 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. LKjIP BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 merupakan bentuk pertanggung jawaban OPD yang dituangkan dalam suatu format laporan, dimana proses penyusunannya mengacu kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.


LKjIP BKPSDM Kabupaten Sintang tahun anggaran 2019 disusun dengan dibarengi suatu harapan agar seluruh personil yang ada di BKPSDM Kabupaten Sintang dapat melakukan proses penilaian diri sendiri (self assessment) dengan memahami secara utuh serta menyeluruh kandungan LKjIP sehingga dapat mengevaluasi kinerja yang ada dalam upaya mendorong semangat demi perbaikan dalam pelaksanaan tugas yang disesuaikan dengan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja, sehingga kedepan dapat diperoleh peningkatan kinerja yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Keterbatasan segala hal dalam penyusunan LKjIP ini, diperlukan adanya penyempurnaan dari pihak terkait dalam memberikan arahan dan evaluasi sehingga BKPSDM Kabupaten Sintang senantiasa akan terus berupaya melakukan penyempurnaan demi terwujudnya kesempurnaan LKjIP sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak terutama di Lingkungan BKPSDM Kabupaten Sintang.

Semoga harapan ini dapat terwujud dengan semakin dikembangkannya semangat kerjasama yang terarah di Lingkungan BKPSDM Kabupaten Sintang.

Sintang, Maret 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SINTANG,



PALENTINUS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601216 198509 1 001

DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM BKPSDM KABUPATEN SINTANG	2
B. PERMASALAHAN UTAMA	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. RENSTRA	19
B. PERJANJIAN KINERJA 2018	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	48
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	48
B. REALISASI ANGGARAN	89
BAB IV PENUTUP	116
LAMPIRAN : 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
2) Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2019	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sintang Tahun 2019 adalah laporan capaian kinerja (*Performance Result*) yang disesuaikan dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) dan merupakan penjabaran kegiatan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Sintang dengan capaian 4 (empat) sasaran strategis dan capaiannya sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Capaian Sasaran
1	Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Valid dan berkualitas serta layanan Administrasi Kepegawaian yang Handal dan Profesional	92,62 %
2	Terwujudnya Peningkatan kualitas kebijakan Rekrutmen dan penetapan penempatan Pegawai ASN yang Profesional	91,17 %
3	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan Produktifitas Kinerja layanan Pegawai ASN yang Profesional, Efektif, Efisien, Kreatif, Inovatif dan Visioner	87,58 %
4	Terwujudnya Peningkatan pembinaan dan pengembangan Manajemen Kepegawaian yang berkelanjutan guna membangun komitmen integritas dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup Pegawai ASN	89,21 %
	Rata-rata capaian sasaran	91,39 %

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran BKPSDM Kabupaten Sintang dalam pencapaian visi dan misi pada Pemerintah Kabupaten. Pengukuran capaian kinerja meliputi pengukuran realisasi 7 (Tujuh) IKU yang paling berpengaruh capaian sasaran strategis dari 7 IKU yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun rincian capaian masing-masing sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Capaian sasaran strategis “Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Valid dan berkualitas serta layanan Administrasi Kepegawaian yang Handaldan Profesional” sebesar 92,62% tercermin dalam capaian 9 (sembilan) indek kinerja dengan kategori **sangat berhasil**.
- 2) Capaian sasaran strategis “Terwujudnya Peningkatan kualitas kebijakan Rekrutmen dan penetapan penempatan Pegawai ASN yang Profesional” sebesar 91,17 % tercermin dalam capaian 6 (enam) indek kinerja dengan kategori **sangat berhasil**.
- 3) Capaian sasaran strategis “peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan Produktifitas Kinerja layanan Pegawai ASN yang Profesional, Efektif, Efisien, Kreatif, Inovatif dan Visioner” sebesar 87,58% tercermin dalam capaian 11 (sebelas) indek kinerja dengan kategori **sangat berhasil**.
- 4) Capaian sasaran strategis “Terwujudnya Peningkatan pembinaan dan pengembangan Manajemen Kepegawaian yang berkelanjutan guna membangun komitmen integritas dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup Pegawai ASN” sebesar 89,21 % tercermin dalam capaian 15 (lima belas) indek kinerja dengan kategori **sangat berhasil**.

Beberapa masalah yang dapat menghambat pencapaian target kinerja sasaran antara lain :

- Proses penyesuaian pendidikan PNS Kabupaten Sintang pada SAPK yang di verifikasi oleh Kanreg V BKN Jakarta sering mengalami keterlambatan dalam penyesuaian data tersebut. Sejak Tahun 2017 BKN Pusat tidak lagi menerbitkan KPE sedangkan aturan pelaksanaan tentang hal tersebut belum diterbitkan, sehingga permasalahan yang terjadi, dengan adanya KPE yang rusak/hilang dan sebagainya menyebabkan KPE tidak dapat diganti
- Pelantikan Pejabat Struktural hanya dilaksanakan untuk mengisi Jabatan lowong yaitu Pejabat Eselon II/b, sedangkan untuk pejabat lainnya (eselon III dan IV) tidak dapat

dilaksanakan, hal ini disebabkan belum adanya keputusan atau tindak lanjut dari Tim Penilai Kinerja untuk melakukan proses mutasi, rotasi dan promosi Jabatan

- Kekurangan PNS di Lingkungan Pemeintah Kabupaten Sintang menyebabkan penyebaran pegawai yang masih belum memenuhi kebutuhan OPD secara merata
- Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Sintang belum memiliki Laboratorium CAT yang representative sehingga kegiatan seperti:
 - ∞ Ujian Dinas
 - ∞ Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah
 - ∞ Seleksi Penerimaan CPNS
 - ∞ Ujian Kompetensi Lainnya

masih menggunakan Laboratorium CAT yang berada diluar BKPSDM/luar daerah

- Masih terdapat berkas-berkas proses pembinaan/pemanggilan yang kurang (tidak lengkap).
- Peserta pembekalan purna tugas PNS sangat penting bagi PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), sebagian besar dari guru yang melaksanakan tugas di daerah terpencil yang transportasinya sulit dijangkau, sehingga mengalami kesulitan menyampaikan informasi tentang kegiatan tersebut dan tidak semua yang mau mengikutinya di Sintang.
- Keterbatasan anggaran, terbatasnya kuota peserta Diklat dan belum adanya Gedung Diklat yang representatif menyebabkan terbatasnya pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan dan tidak dapat menyelenggarakan Diklatpim sehingga masih banyak Pejabat Struktural belum mengikuti Diklatpim sesuai jenjang jabatannya

Masih terdapat kesulitan BKPSDM untuk memonitoring dan mengevaluasi PNS yang sudah mengikuti Diklat Teknis/fungsional yang sesuai dengan bidang tugas PNS.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan langkah-langkah :

- BKPSDM dalam hal ini sering melakukan koordinasi baik secara tertulis maupun lisan.
- Untuk sementara KPE diganti dengan ATM pendamping yang diterbitkan oleh Bank Kalbar dan BKPSDM sudah mengkoordinasikan hal tersebut ke BKN Pusat
- Tim penilaian kinerja melakukan pertimbangan secara berkala tentang proses mutasi, rotasi dan jabatan dan merencanakan akan melakukan kegiatan pengukuhan/pelantikan jabatan tersebut ditahun yang akan datang (Tahun 2020)
- BKPSDM harus melaksanakan mutasi PNS untuk memenuhi kebutuhan SKPD sesuai dengan Tim Baperjakat dan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Oganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
- BKPSDM harus melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Sintang terkait dengan redistribusi PNS dan melakukan rapat pertimbangan dengan Tim Pertimbangan (Baperjakat) serta menindaklanjuti dengan surat tugas mutasi sesuai dengan hasil pertimbangan mutasi tersebut.
- Pemerintah Kabupaten Sintang/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang harus menyiapkan Laboratorium CAT dengan segala perangkat pendukungnya.
- Diharapkan pimpinan OPD selaku atasan langsung pada setiap OPD dapat melakukan dan mengambil tindakan sesuai proses atau prosedur tentang penyelesaian kasus yang

ada pada OPD yang bersangkutan berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terutama tentang hierarki atau tahapan penanganan kasus.

- Masih terdapat Pimpinan OPD dan pengelola kepegawaian pada OPD kurang memahami proses penyelesaian kasus baik kasus pelanggaran disiplin maupun proses izin perceraian.
- BKPSDM selalu berupaya agar kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh seluruh PNS yang akan pensiun dengan menginformasi melalui instansi terkait.
- Pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini harus memprioritaskan Alokasi Anggaran untuk Diklatpim dan membangun gedung yang representative
- Perlu adanya peran serta sub bag Aparatur dimasing-masing OPD untuk mensinkronkan data dengan surat tugas yang diterbitkan oleh BKPSDM.
- Pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini harus memprioritaskan alokasi anggaran untuk Diklatpim dan membangun gedung yang representative
- Perlu adanya peran serta sub bag Aparatur dimasing-masing OPD untuk mensinkronkan data PNS yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional dengan surat tugas yang diterbitkan oleh BKPSDM.

DAFTAR BAGAN

		hal
Bagan 1	Struktur Organisasi BKPSDM KabupatenSintang	5
Bagan 2	Keterkaitan Visi dan Misi BKPSDM KabupatenSintang	23

DAFTAR TABEL

		hal	
Tabel	1.1	Data Pegawai BKPSDM Kabupaten Sintang	10
Tabel	1.2	Data Sarana dan Prasarana	11
Tabel	2.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	30
Tabel	2.2	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target	41
Tabel	2.3	Program dan Kegiatan	45
Tabel	3.1	Hasil Pengukuran Kinerja	52
Tabel	3.2	Anggaran dan Realisasi Sasaran 1	53
Tabel	3.3	Target dan Realisasi Sasaran 1	56
Tabel	3.4	Data Kenaikan Pangkat Periode April 2019	59
Tabel	3.5	Data Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2019	60
Tabel	3.6	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017,2018 dan 2019	61
Tabel	3.7	Anggaran dan Realisasi Sasaran 2	64
Tabel	3.8	Target dan Realisasi Sasaran 2	65
Tabel	3.9	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017,2018 dan 2019	68
Tabel	3.10	Anggaran dan Realisasi Sasaran 3	70
Tabel	3.11	Target dan Realisasi Sasaran 3	71
Tabel	3.12	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017,2018 dan 2019	75
Tabel	3.13	Anggaran dan Realisasi Sasaran 4	77
Tabel	3.14	Target dan Realisasi Sasaran 4	78
Tabel	3.15	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018	84
Tabel	3.16	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung	90
Tabel	3.17	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung	91

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sintang TA 2019 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Sintang.

Dengan disusunnya LKjIP BKPSDM Kabupaten Sintang ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Mendorong Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) BKPSDM untuk menyelenggarakan tugas umum BKPSDM dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya BKPSDM yang akuntabel sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai ASN BKPSDM.
4. Terpelihara kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Sintang.

A. GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG

1. Pendahuluan

Dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang. Dengan adanya Peraturan Bupati Sintang Nomor 128 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang, maka BKPSDM Kabupaten Sintang adalah unsur pelaksana dan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.

Penyusunan dan pelaporan kinerja BKPSDM Kabupaten Sintang dimaksudkan untuk memberikan informasi, dan gambaran konkrit atas apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 yang menyangkut keberhasilan

dan kegagalan serta hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 yang telah disusun sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan bagi BKPSDM Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja aparatur sipilnegara BKPSDM Kabupaten Sintang.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 128 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang, maka Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.
3. Bidang Data dan Pengembangan Pegawai, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Data, Informasi dan Dokumentasi Pegawai;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Pegawai.
4. Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun;

- b. Sub Bidang Kepangkatan dan Pengadaan.
-
- 5. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Disiplin Pegawai;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai dan KORPRI
 - 6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Prajabatan;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan fungsional.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Sintang dapat digambarkan pada Bagan 1 berikut ini :

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas Pokok

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

Melaksanakan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Kepegawaian dan tugas Kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan penyusunan Peraturan, Perundang-undangan Daerah di Bidang Kepegawaian sesuai dengan Norma, Standar dan Prosedur yang ditetapkan Pemerintah.
- 2) Perencanaan pengembangan Kepegawaian Daerah.
- 3) Penyiapan Kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah.
- 4) Penyiapan pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.
- 5) Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai ASN Daerah.

- 6) Perencanaan Kesejahteraan Pegawai ASN Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.
- 7) Penyelenggaraan administrasi, data, informasi dan dokumentasi Pegawai ASN Daerah.
- 8) Penyiapan Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai ASN Daerah dengan berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- 9) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN Daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah.
- 10) Pengelolaan administrasi umum meliputi : Penyusunan program, Ketatalaksanaan, Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga, Perlengkapan, Humas dan Arsip di bidang Kepegawaian Daerah.
- 11) Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 12) Penyusunan penetapan kinerja di bidang kepegawaian.
- 13) Penyusunan Analisa Jabatan.
- 14) Penyusunan Pengawasan Melekat.
- 15) Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan di bidang Kepegawaian Daerah.
- 16) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

4. Data Sumber Daya Aparatur

a. Kepegawaian

Pegawai sebagai aset utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Organisasi akan menjalani kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya, apabila semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi dan tanpa didukung dengan kinerja yang baik. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya.

Keadaan Pegawai ASN pada BKPSDM Kabupaten Sintang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 53 pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

1) Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri atas:

- a) Golongan I = 1 orang
- b) Golongan II = 10 orang
- c) Golongan III = 35 orang
- d) Golongan IV = 6 orang

2) Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri atas:

- a) S2 = 12 orang
- b) S1 = 27 orang
- c) D3 = 2 orang
- d) SLTA = 10 orang
- e) SLTP = - orang
- f) SD = - orang

3) Pegawai yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan, adalah sebagai berikut :

- a) Diklat Pim II = 1 orang
- b) Diklat Pim III = 4 orang
- c) Diklat Pim IV = 10 orang

4) Dari segi Jabatan Struktural / Eselon adalah sebagai berikut :

- a) Eselon II.b = 1 orang
- b) Eselon III.a = 1 orang
- c) Eselon III.b = 3 orang
- d) Eselon IV.a = 10 orang

Selain Pegawai ASN, BKPSDM Kabupaten Sintang dibantu oleh Pegawai Non Organik (Tenaga Kontrak) dengan jumlah 7 orang, sebagai petugas penjaga malam kantor dan gedung diklat serta Tenaga Administrasi.

Secara keseluruhan, pegawai BKPSDM Kabupaten Sintang dapat digambarkan pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
DATA PEGAWAI ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SINTANG

No	Eselon/ Non Eselon	Pendidikan						Golongan			
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
1	Eselon II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	Eselon III	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-
3	Eselon IV	4	6	-	-	-	-	-	10	-	-
4	Fungsional Tertentu	2	1	-	-	-	-	1	2	-	-
5	Non Eselon	1	20	2	10	-	-	-	25	10	-
6	Tenaga Kontrak	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-
Jumlah		12	31	2	13	-	-	6	35	10	-

Sumber data : Sub Bagian Aparatur dan Umum Tahun 2019

5. Sumber Daya Keuangan

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Sintang selama tahun 2019, anggaran yang tersedia bersumber dari APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 yaitu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ DPA Perubahan BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp 13.551.652.510,00**

yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 4.832.104.509,00** dan Anggaran Belanja Langsung **Rp. 8.719.548.001,00**.

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber data yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di BKPSDM adalah sebagaimana dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
DATA SARANA DAN PRASARANA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SINTANG

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanah Diklat	11.857 M2	
2	Tanah Kantor BKPSDM	5.495 M2	
3	Bangunan Diklat	1 Unit	Kurang Baik
4	Bangunan Kantor BKPSDM	1 Unit	
5	Genset	1 Unit	
6	Rak Arsip	2 Unit	
7	Mesin Ketik	2 Unit	
8	Lemari Besi/Metal	6 Unit	
9	Rak Besi/Metal	6 Unit	
10	Rak Arsip Kayu	1 Unit	Rusak Berat
11	Filling Cabinet	1 Unit	

12	Lemari Arsip	9 Unit	Rusak Ringan
13	Brangkas	1 Unit	
14	Mesin Absensi	1 Unit	
15	Lemari Kayu	4 Buah	
16	Meja Belajar Diklat	13 Unit	Di Gedung Diklat
17	Kursi Besi (Futura)	29 Unit	Di Gedung Serbaguna
18	Kursi Rapat	20 Unit	
19	Tempat Tidur Besi	27 Unit	Di Asrama Diklat
20	Meja Belajar Diklat	27 Unit	Di Gedung Diklat
21	Meja Makan	9 Unit	Di Gedung Diklat
22	Kursi Mahasiswa	50 Buah	Di Gedung Serbaguna
23	Meja Komputer	20 Unit	
24	Sepre	46 Buah	Di Gedung Diklat
25	Meja ½ Biro	8 Buah	
26	Gorden Gedung Diklat	1 Paket	Bahan Kain
27	Gorden Gedung Kantor BKPSDM	1 Paket	Bahan Plastik
28	Kursi Direksi	4 Buah	
29	Alas Meja	1 Unit	
30	Lemari Plastik	2 Unit	
31	Sarung Kursi	1 Unit	
32	Mesin Penghisap Debu	1 Unit	
33	Mesin Potong Rumput	3 Unit	2 Rusak Ringan
34	AC split	14 Unit	
35	Kipas angin	1 Unit	
36	Tong Air	5 Buah	Di gedung Diklat
37	Televisi	4 Buah	

38	Mic conference	2 Buah	
39	Unit power supply	6 Buah	
40	Camera Digital	1 Buah	
41	Dispenser	2 Buah	
42	Peralatan Tidur	47 Unit	Di Gedung Diklat
43	Spray untuk Diklat	49 Unit	Di Gedung Diklat
44	Parabola	1 Unit	Di Gedung Diklat
45	Alat pemadam portable	5 Buah	
46	AMP RJ45 Connector Cat 5e	1 Unit	
47	Kabel LAN	2 Unit	
48	PC Komputer/PC Unit	24 Unit	
49	Laptop	22 Unit	
50	Notebook	7 Unit	
51	Criming Tool	1 Unit	
52	CPU/UPS	2 Unit	
53	Printer	34 Buah	
54	Scaner	1 Unit	
55	Keyboard	1 Unit	
56	UPS	6 Unit	
57	Server	1 Unit	
58	Router	1 Unit	
59	Mikrotik Router	1 Unit	
60	Hub/Mikrotik 94ITC	1 Unit	
61	UTP Cat 5e	1 Unit	
62	AMP RJ45	1 Unit	
63	Kabel UTP	1 Unit	
64	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 Buah	
65	Meja Kerja Pejabat Eselon III	17 Buah	

66	Meja 1 Biro	2 Buah	
67	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11 Buah	
68	Meja Kerja Pegawai Non struktural	4 Buah	
69	Meja Rapat pejabat eselon III	1 Unit	
70	Kursi kerja pejabat eselon II	1 Buah	
71	Kursi kerja pejabat eselon III	2 Unit	
72	Kursi kerja pejabat eselon IV	10 Unit	
73	Kursi Tamu	1 Unit	
74	Lemari Buku utk Pejabat Esln III	7 Buah	Rusak Ringan
75	Camera dan attachment	3 Unit	
76	Proyektor dan attachment	4 Unit	
77	Microphone/wireless mic	3 Unit	
78	Camera Digital	3 Unit	
79	Sound System	8 Unit	
80	Facsimile	1 Unit	Rusak Berat
81	Mushola gedung diklat BKD	1 Unit	Rusak Ringan
82	Pos Jaga Gedung Diklat	1 Unit	Rusak Ringan
83	Ruang Belajar Diklat	1 Unit	Rusak Berat
84	Papan Nama Instansi	1 Unit	
85	Tiang Penyangga Spanduk	1 Unit	
86	Ruang Makan Gedung Diklat	1 Unit	Kurang Baik
87	Dapur Gedung Diklat	1 Unit	Kurang Baik
88	Pagar Depan Gedung Diklat	1 Unit	
89	Rumah negara Gol.II type b	1 Unit	
90	Ruang Penginapan Peserta	1 Unit	Kurang Baik
91	Bangunan buangan air hujan	1 Unit	
92	Turap	1 Unit	
93	Sumur Bor	1 Unit	Kurang Baik

Sumber data : Sub Bagian Perlengkapan Tahun 2019.

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGI ISSUED*)

1. Bidang Data dan Pengembangan Pegawai

a) Sub Bidang Data, Informasi dan Dokumentasi Pegawai

Proses penyesuaian pendidikan PNS Kabupaten Sintang pada SAPK yang di verifikasi oleh Kanreg V BKN Jakarta sering mengalami keterlambatan dalam penyesuaian data tersebut

Sejak Tahun 2017 BKN Pusat tidak lagi menerbitkan KPE sedangkan aturan pelaksanaan tentang hal tersebut belum diterbitkan, sehingga permasalahan yang terjadi, dengan adanya KPE yang rusak/hilang dan sebagainya menyebabkan KPE tidak dapat diganti

Pemecahan Masalah :

- BKPSDM dalam hal ini sering melakukan koordinasi baik secara tertulis maupun lisan.
- Untuk sementara KPE diganti dengan ATM pendamping yang diterbitkan oleh Bank Kalbar dan BKPSDM sudah mengkoordinasikan hal tersebut ke BKN Pusat

b) Sub Bidang Pengembangan Pegawai

- Pelantikan Pejabat Struktural hanya dilaksanakan untuk mengisi Jabatan lowong yaitu Pejabat Eselon II/b, sedangkan untuk pejabat lainnya (eselon III dan IV) tidak dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan belum adanya keputusan atau tindak lanjut dari Tim Penilai Kinerja untuk melakukan proses mutasi, rotasi dan promosi Jabatan

Pemecahan Masalah :

- Tim penilaian kinerja melakukan pertimbangan secara berkala tentang proses mutasi, rotasi dan jabatan dan merencanakan akan melakukan kegiatan pengukuhan/pelantikan jabatan tersebut ditahun yang akan datang (Tahun 2019)

2. Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai

a) Sub Bidang Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun

Kekurangan PNS di Lingkungan Pemeintah Kabupaten Sintang menyebabkan penyebaran pegawai yang masih belum memenuhi kebutuhan OPD secara merata

Pemecahan Masalah :

BKPSDM harus melaksanakan mutasi PNS untuk memenuhi kebutuhan SKPD sesuai dengan Tim Baperjakat dan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Oganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang

b) Sub Bidang Kepangkatan dan Pengadaan

Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Sintang belum memiliki Laboratorium CAT yang representative sehingga kegiatan seperti:

- ∞ Ujian Dinas
- ∞ Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah
- ∞ Seleksi Penerimaan CPNS
- ∞ Ujian Kompetensi Lainnya

masih menggunakan Laboratorium CAT yang berada diluar BKPSDM/luar daerah

Pemecahan Masalah :

Pemerintah Kabupaten Sintang/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang harus menyiapkan Laboratorium CAT dengan segala perangkat pendukungnya.

3. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

a) Sub Bidang Disiplin Pegawai

- Masih terdapat berkas-berkas proses pembinaan/pemanggilan yang kurang (tidak lengkap).

Pemecahan Masalah :

Diharapkan pimpinan OPD selaku atasan langsung pada setiap OPD dapat melakukan dan mengambil tindakan sesuai proses atau prosedur tentang penyelesaian kasus yang ada pada OPD yang bersangkutan berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terutama tentang hierarki atau tahapan penanganan kasus.

- Masih terdapat Pimpinan OPD dan pengelola kepegawaian pada OPD kurang memahami proses penyelesaian kasus baik kasus pelanggaran disiplin maupun proses izin perceraian.

Pemecahan Masalah :

Perlu dilaksanakan Bimtek penyelesaian kasus-kasus bagi pimpinan OPD dan Bidang yang menangani Kepegawaian pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Kopri

Peserta pembekalan purna tugas PNS sangat penting bagi PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), sebagian besar dari guru yang melaksanakan tugas di daerah terpencil yang transportasinya sulit dijangkau, sehingga mengalami kesulitan menyampaikan informasi tentang kegiatan tersebut dan tidak semua yang mau mengikutinya di Sintang.

Pemecahan Masalah :

BKPSDM selalu berupaya agar kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh seluruh PNS yang akan pensiun dengan menginformasi melalui instansi terkait.

4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Prajabatan

Keterbatasan anggaran, terbatasnya kuota peserta Diklat dan belum adanya Gedung Diklat yang representatif menyebabkan terbatasnya pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan dan tidak dapat menyelenggarakan Diklatpim sehingga masih banyak Pejabat Struktural belum mengikuti Diklatpim sesuai jenjang jabatannya

Pemecahan Masalah :

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini harus memprioritaskan alokasi anggaran untuk Diklatpim dan membangun gedung yang representative

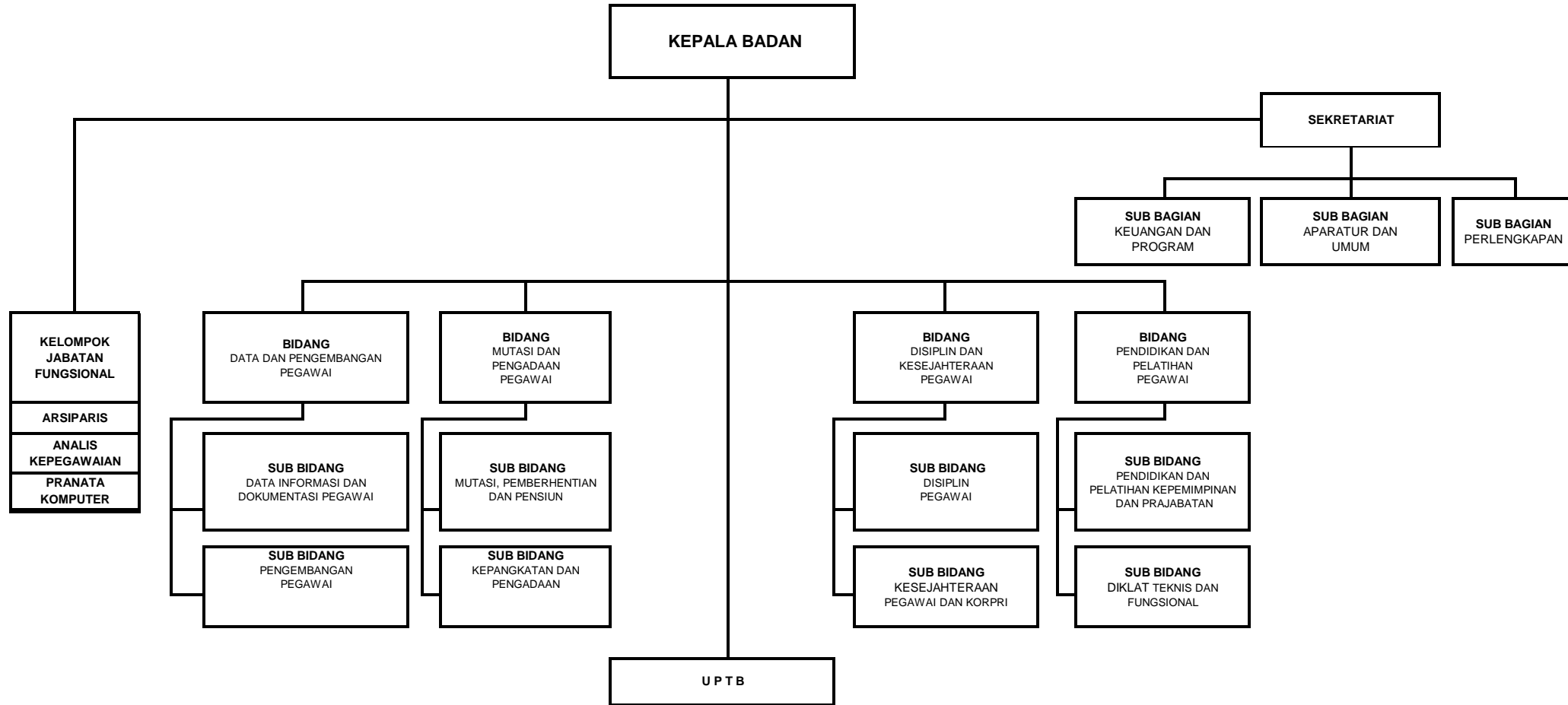
b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

Masih terdapat kesulitan BKPSDM untuk memonitoring dan mengevaluasi PNS yang sudah mengikuti Diklat Teknis/fungsional yang sesuai dengan bidang tugas PNS.

Pemecahan Masalah :

Perlu adanya peran serta sub bag Aparatur dimasing-masing OPD untuk mensinkronkan data PNS yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional dengan surat tugas yang diterbitkan oleh BKPSDM.

Bagan 1
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan (BKPSDM) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan suatu dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan program yang akan dicapai. Rencana Strategis juga berguna sebagai pedoman atau acuan bagi BKPSDM Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku unsur pelayanan administrasi kepegawaian Pemerintahan Daerah dalam mendukung terlaksananya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1. Visi

Visi BKPSDM di rumuskan untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Sintang secara dimensional pernyataan visi berfokus kemasa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Misi pembangunan kabupaten Sintang salah satunya yang terkait dengan tugas pokok BKPSDM adalah misi yang ke 6 yaitu :

“Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”.

Dalam mewujudkan misi ke 6 pembangunan Kabupaten Sintang tersebut maka Visi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang di rumuskan untuk 5 Tahun kedepan (2016- 2021) yaitu :

“Terwujudnya Pegawai ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang Profesional, Berintegritas Dan Sejahtera Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”.

Visi tersebut diatas mempunyai makna:

Pertama : **Pegawai ASN**

SDM Aparatur yang diidasi oleh nilai-nilai dasar profesi sebagai karakter Pegawai ASN yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan prima sesuai dengan prinsip penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

Kedua : **Profesional**

Sosok pegawai ASN yang memiliki standar kompetensi, kapasitas dan integritas serta menjunjung tinggi kode etik yang berorientasi pada produktivitas kinerja layanan prima sesuai dengan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

Ketiga : **Integritas**

Seperangkat nilai spirit pelayanan yang solid meliputi nilai dasar profesi, kompetensi, moralitas, norma, etika, kaidah, kejujuran, netralitas, loyalitas, tanggungjawab, berkeadilan, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, jiwa korsa KOPRI, karkter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, berdaya saing dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang dalam bingkai tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

Keempat : **Sejahtera**

Suatu kondisi yang diupayakan secara berkesinambungan guna meningkatkan dan

mengembangkan kualitas kesejahteraan hidup Pegawai ASN yang layak sesuai dengan profesi, kondisi kerja, keahlian, serta kinerja dalam bingkai tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

2. Misi

Guna mewujudkan cita-cita sesuai Visi BKPSDM Kabupaten Sintang, maka perlu menjabarkan menjadi misi agar dapat menjadi pedoman dalam perumusan **Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan** dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun kedepan. Adapun Misi BKPSDM Kabupaten Sintang adalah:

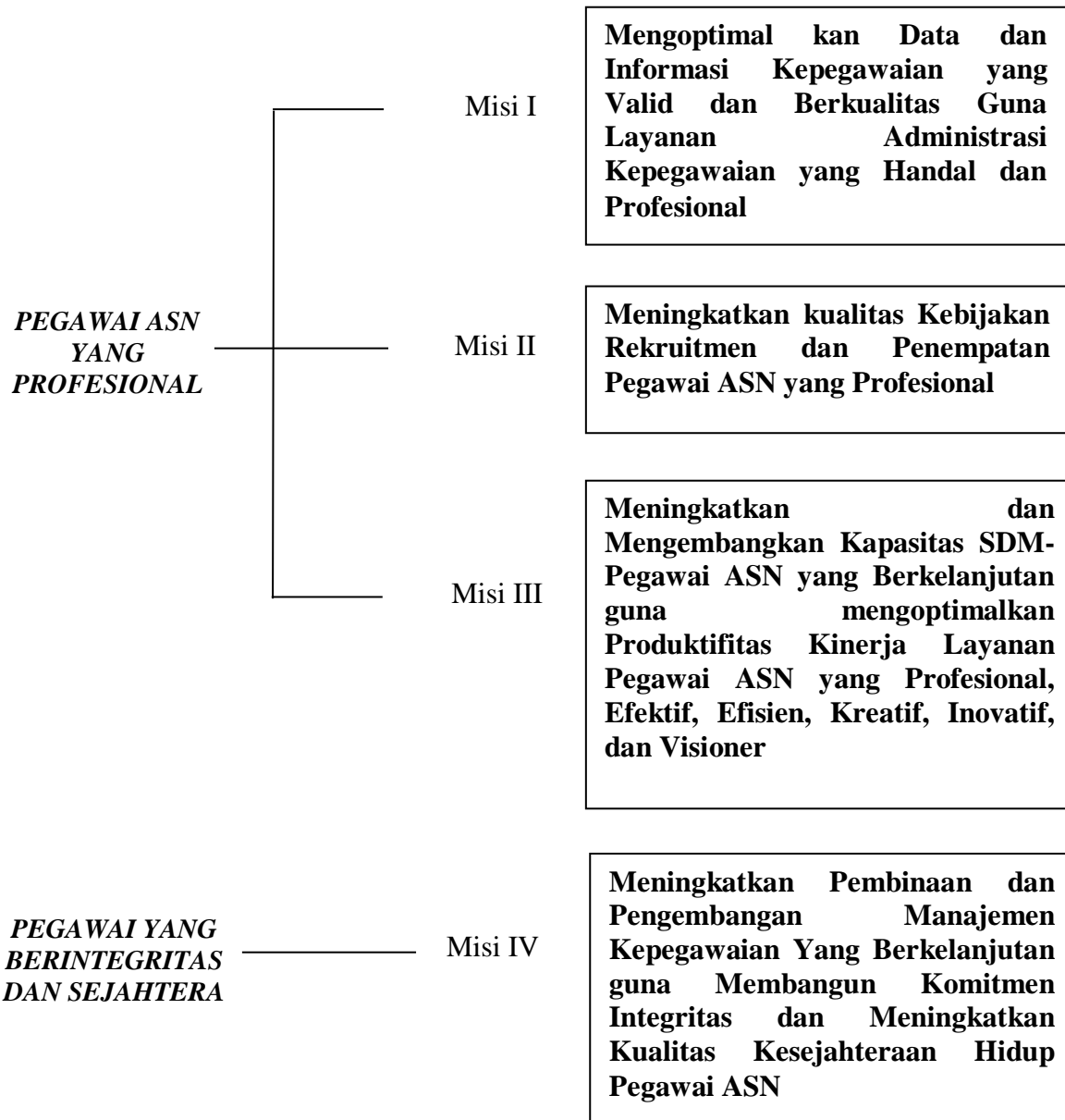
- a. Mengoptimalkan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Valid dan Berkualitas serta Layanan Administrasi Kepegawaian yang Handal dan Profesional
- b. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Rekrutmen dan Penempatan Pegawai ASN yang Profesional
- c. Meningkatkan dan mengembangkan Kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan Produktivitas Kinerja Layanan Pegawai ASN yang Profesional, Efektif, Efisien, Kreatif, Inovatif dan Visioner
- d. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Manajemen Kepegawaian yang berkelanjutan guna membangun Komitmen Integritas dan meningkatkan Kualitas Kesejahteraan hidup Pegawai ASN

a. Keterkaitan Visi dan Misi

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi BKPSDM Kabupaten Sintang tahun 2016 – 2021 dapat di jelaskan dalam Bagan sebagai berikut ini :

Bagan 2

Keterkaitan Visi dan Misi BKPSDM Kabupaten Sintang



3. Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Utama

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan yang akan dicapai BKPSDM adalah sebagai berikut:

1) Misi Pertama

Mengoptimalkan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Valid dan Berkualitas Guna Layanan Administrasi Kepegawaian yang Handal dan Profesional

Tujuan :

Mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi kepegawaian yang valid dan berkualitas serta pelayanan kepegawaian yang handal dan professional

2) Misi Kedua

Meningkatkan kualitas Kebijakan Rekrutmen dan Penempatan Pegawai ASN yang Profesional

Tujuan :

Meningkatkan kualitas Kebijakan Rekrutmen dan Penempatan Pegawai ASN yang Profesional

3). Misi Ketiga

Meningkatkan dan Mengembangkan Kapasitas SDM-Pegawai ASN yang Berkelanjutan guna mengoptimalkan Produktifitas Kinerja Layanan Pegawai ASN yang Profesional, Efektif, Efisien, Kreatif, Inovatif, dan Visioner

Tujuan :

Meningkatkan dan Mengembangkan Kapasitas SDM-Pegawai ASN yang Berkelanjutan guna mengoptimalkan Produktifitas Kinerja Layanan Pegawai ASN yang Profesional, Efektif, Efisien, Kreatif, Inovatif, dan Visioner

4). Misi Keempat

Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Kepegawaian Yang Berkelanjutan guna Membangun Komitmen Integritas dan Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Hidup Pegawai ASN

Tujuan :

Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Kepegawaian Yang Berkelanjutan guna Membangun Komitmen Integritas dan Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Hidup Pegawai ASN

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun orientasi pada hasil dapat dicapai dalam periode tertentu. Sasaran strategis BKPSDM Kabupaten Sintang juga disertai **Indikator Kinerja** sasaran. Dimana indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif yang dijadikan tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut maka BKPSDM Kabupaten Sintang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Valid dan berkualitas serta Layanan Administrasi Kepegawaian yang Handal dan Profesional
- 2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Rekrutmen dan Penempatan Pegawai ASN yang Profesional
- 3) Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan Produktifitas Kinerja Layanan Pegawai ASN yang Profesional, Efektif, Efisien, Kreatif, Inovatif dan Visioner
- 4) Terwujudnya Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Kepegawaian yang berkelanjutan guna membangun komitmen integritas dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup pegawai ASN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan BKPSDM Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Valid dan berkualitas melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang Handal, Cepat, Akurat, Tepat Waktu dan bertanggung jawab.
- 2) Pelaksanaan Kebijakan Rekrutmen dan Penempatan Pegawai ASN yang berkualitas dan Profesional melalui analisis jabatan, dan analisis BK sesuai dengan Peta Jabatan, kebutuhan organisasi, formasi, jabatan, kualifikasi akademik dan standar kompetensi
- 3) Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan produktifitas kinerja layanan pegawai ASN yang Profesional, Efektif, Efisien, Kreatif, Inovatif dan Visioner
- 4) Pelaksanaan Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Kepegawaian yang berkelanjutan dengan membangun komitmen

integritas, spirit kepelayanan, tanggung jawab, moral, kejujuran, Loyalitas, netralitas, semangat dan motivasi nasionalisme, dan kebangsaan, Jiwa Korsa KOPRI, keseimbangan kewajiban dan hak, menegakkan reward dan punishment, meningkatkan karakter kepribadian yang unggul dan berdaya saing, memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang, dan upaya-upaya meningkatkan kualitas bertanggung jawab, dan memperkuat Profesionalisme serta kompetensi bidang dan peningkatan kesejahteraan Pegawai ASN

Kebijakan dalam mewujudkan sasaran strategis merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1) Sasaran :

Terwujudnya Optimalisasi pengelolaan Data dan informasi Kepegawaian yang Valid dan berkualitas serta Layanan Administrasi Kepegawaian yang Handal dan Profesional

Kebijakan :

- a) Pengelolaan dan/atau Pemutahiran Data Kepegawaian pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
- b) Sinkronisasi Data Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
- c) Pengelolaan Informasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d) Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang berkualitas

2) Sasaran :

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Rekrutmen dan Penempatan Pegawai ASN yang Profesional

Kebijakan :

- a) Melaksanakan Perencanaan Kebutuhan Pegawai dan seleksi CPNS dan PPPK
- b) Mengkoordinasikan Pelaksanaan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Kebutuhan Pegawai ke OPD terkait
- c) Melaksanakan rapat pertimbangan mutasi jabatan/mutasi staf.

3) Sasaran :

Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan Produktifitas Kinerja layanan Pegawai ASN yang Profesional, Efektif, Efisien, Kreatif, Inovatif dan Visioner

Kebijakan :

- a) Melaksanakan penyelenggaraan/pengiriman guna peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM-Pegawai ASN.
- b) Melaksanakan Koordinasi peningkatan dan Pengembangan SDM-Pegawai ASN ke Instansi/Lembaga terkait
- c) Melaksanakan Rapat Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, Seleksi Peserta Diklat Instansi, Pengiriman Mahasiswa Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
- d) Memberikan bantuan/fasilitasi pegawai ASN yang melaksanakan ijin belajar, ujian penyesuaian paket (A, B, C), Ujian Dinas

4) Sasaran :

Terwujudnya peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Kepegawaian yang berkelanjutan guna membangun komitmen integritas dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup pegawai ASN

Kebijakan :

- a) Melaksanakan Pembinaan Kepegawaian yang berkelanjutan berkaitan dengan kedudukan, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban serta disiplin dan integritas Pegawai ASN
- b) Meningkatkan upaya-upaya kualitas kesejahteraan hidup pegawai ASN
- c) Melaksanakan Rapat Pertimbangan Pemberian Penghargaan (reward) dan Hukuman Disiplin Pegawai ASN (punishman)

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

<p>Visi : <i>“Terwujudnya Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang Profesional, Berintegritas Dan Sejahtera Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”.</i></p>			
<p>Misi I : Mengoptimalkan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Valid dan Berkualitas guna Layanan Administrasi Kepegawaian yang Handal dan Profesional</p>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<p>Mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi kepegawaian yang valid dan berkualitas serta pelayanan kepegawaian yang handal dan profesional</p>	<p>Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Valid dan berkualitas serta Layanan Admiistrasi Kepegawaian yang Handal dan Profesional</p>	<p>Penyediaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Valid dan berkualitas melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang Handal, Cepat, Akurat dan Tepat Waktu, Bertanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan/atau Pemutahiran Data Kepegawaian pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 2. Sinkronisasi Data Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang 3. Pengelolaan Informasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang berkualitas

Misi II : Meningkatkan kualitas Kebijakan Rekrutmen dan Penempatan Pegawai ASN yang Profesional

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Peningkatan Kualitas Kebijakan Rekrutmen dan Penempatan Pegawai ASN yang Profesional	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Rekrutmen dan Penempatan Pegawai ASN yang Profesional	Pelaksanaan Kebijakan Rekrutmen dan Penempatan Pegawai ASN yang berkualitas dan profesional melalui analisis BK sesuai dengan Peta Jabatan, kebutuhan organisasi, formasi, jabatan, kualifikasi akademik dan standar kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perencanaan kebutuhan pegawai 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Kebutuhan Pegawai ke OPD terkait 3. Melaksanakan Rapat Pertimbangan Mutasi/Penempatan Staf

Misi III : Meningkatkan dan mengembangkan Kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan Produktifitas Kinerja Layanan Pegawai ASN yang Profesional, Efektif, Efisien, Kreatif, Inovatif dan Visioner

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan produktifitas kinerja layanan pegawai ASN yang profesional, efektif, efisien, kreatif, inovatif dan visioner	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan Produktifitas Kinerja Layanan Pegawai ASN yang profesional, efektif, efisien, kreatif, inovatif dan visioner	Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan produktifitas kinerja layanan pegawai ASN yang profesional, efektif, efisien, kreatif, inovatif dan visioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penyelenggaraan /pengiriman guna peningkatan dan Pengembangan Kapasitas SDM-Pegawai ASN 2. Melaksanakan Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan SDM-Pegawai ASN ke Instansi/Lembaga terkait 3. Melaksanakan Rapat Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, Seleksi Peserta Diklat Instansi, Pengiriman Mahasiswa Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 4. Memberikan bantuan/fasilitasi pegawai ASN yang melaksanakan ijin belajar, ujian penyesuaian paket (A, B, C), Ujian Dinas

Misi IV : Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Kepagawaian Yang Berkelanjutan guna membangun Komitmen Integritas dan Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Hidup Pegawai ASN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Manajemen Kepagawaian yang berkelanjutan guna membangun komitmen integritas dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup Pegawai ASN	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengembangan Manajemen Kepagawaian yang berkelanjutan guna membangun komitmen integritas dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup Pegawai ASN	Pelaksanaan peningkatan pembinaan dan pengembangan Manajemen Kepagawaian yang berkelanjutan dengan membangun komitmen integritas, spirit kepelayanan, tanggung jawab, moral, kejujuran, loyalitas, netralitas, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, Jiwa Korsa KOPRI, keseimbangan kewajiban dan hak, menegakkan reward dan punishman, meningkatkan karakter kepribadian yang Unggul dan berdaya saing, memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang dan upaya-upaya meningkatkan kualitas bertanggung jawab dan memperkuat Profesionalisme serta kompetensi bidang dan peningkatan kesejahteraan Pegawai ASN	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pembinaan Kepegawaian yang berkelanjutan berkaitan dengan kedudukan, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban serta disiplin dan integritas Pegawai ASN Meningkatkan upaya-upaya kualitas kesejahteraan hidup Pegawai ASN Melaksanakan Rapat Pertimbangan Penghargaan (reward) dan Hukuman Disiplin Pegawai ASN (Punishman)

Program

Adapun program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- f. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- g. Peringatan Hari Nasional dan Daerah

c. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Valid dan berkualitas serta layanan Administrasi Kepegawaian yang Handal dan Profesional

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumusan Indikator	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Prosentase Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian dan Layanan Kepegawaian	Jumlah Singkronisasi Data Pegawai ASN	Dokumen	Output
Jumlah Penyelesaian Permasalahan Database SAPK		PNS	Output	
Jumlah penyeragaman infrastruktur SIMPEG		Paket	Output	

		Online		
2.	Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah berkas usulan Pegawai ASN yang naik pangkat per periode	Berkas	Output
		Jumlah berkas usulan SK Pensiun	Berkas	Output
		Jumlah penyelesaian permasalahan KPE sesuai usulan	KPE	Output
		Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran	Jenis	Output
		Jumlah Sarana dan Prasarana terhadap kebutuhan penunjang kegiatan (Kerja dan Diklat)	Jenis	Output
		Jumlah Dokumen pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen	Output

Sasaran 2 Terwujudnya Peningkatan kualitas kebijakan Rekrutmen dan Penetapan penempatan Pegawai ASN yang Profesional

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumusan Indikator	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
J1.	Prosentase Rekrutmen dan Penempatan Pegawai ASN	Jumlah peserta seleksi CPNS	Peserta	Output
		Jumlah peserta seleksi PPPK	Peserta	Output
		Pengantar Tugas CPNS	CPNS	Output
2.	Prosentase Penempatan Pegawai ASN	Jumlah Mutasi Pegawai sesuai dengan usulan	Berkas	Output
		Jumlah Pegawai ASN yang dilantik dalam jabatan struktural	PNS	Output
		Jumlah pertimbangan PNS dalam jabatan Struktural dan Fungsional.	PNS	Output

Sasaran 3 Terwujudnya peningkatan dan pengembangan Kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan Produktifitas Kinerja layanan Pegawai ASN yang Profesional, Efektif, Efisien, Kreatif, Inovatif dan Visioner

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumusan Indikator	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kompetensi SDM-Pegawai ASN	Jumlah PNS dalam pertimbangan Diklat Kepemimpinan	PNS	Output
		Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural	PNS	Output
		Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Formal sesuai usulan	PNS	Output
		Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional	PNS	Output
		Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Bendahara Daerah	PNS	Output
		Jumlah Proses Surat Tugas Diklat Teknis / Fungsional beban OPD	Berkas	Output
		Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	CPNS	Output

		Jumlah Pejabat eselon yang mengikuti Test Kompetensi	PNS	Output
		Jumlah PNS yang diterima sebagai Mahasiswa Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan	PNS	Output
		Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah	PNS	Output
		Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Ujian Dinas	PNS	Output

Sasaran 4 Terwujudnya Peningkatan pembinaan dan pengembangan Manajemen Kepegawaian yang berkelanjutan guna membangun komitmen integritas dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup pegawai ASN

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumusan Indikator	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Prosentase Kesejahteraan Pegawai ASN dan Pembinaan Disiplin Pegawai	Jumlah PNS yang akan mengikuti pembekalan bagi yang akan memasuki purna tugas	PNS	Output

		Jumlah pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	PNS	Output	
		Jumlah penerbitan SK Gaji Berkala sesuai dengan aturan yang berlaku	Berkas	Output	
		Jumlah proses pengelolaan penyelesaian cuti sesuai dengan usulan	Berkas	Output	
		Jumlah proses penyelesaian Kartu Taspen dan Pensiun Pegawai	Berkas	Output	
		Jumlah pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Berkas	Output	
		Jumlah pemberian Bantuan Ijin Belajar S2	Berkas	Output	
		Jumlah PNS yang menerima Karpeg, Karis dan Karsu	Usulan	Output	
		Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Pegawai ASN	Stell	Output	
	2.	Prosentase Pembinaan Disiplin Pegawai ASN	Jumlah PNS yang melaporkan LHKPN	PNS	Output

		Jumlah Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin	Kasus	Output
		Jumlah Kasus penanganan dan perceraian Rumah Tangga PNS	Kasus	Output
		Jumlah PNS yang mengikuti Pembinaan Kode Etik	PNS	Output
		Jumlah PNS yang mengikuti sumpah janji PNS	PNS	Output

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ditetapkan. Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen penetapan/perjanjian kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran. Di tingkat OPD dokumen perjanjian kinerja dibuat oleh Kepala OPD, yang merupakan janji Kepala OPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD).

Sasaran-sasaran dalam perjanjian kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen perjanjian Kinerja adalah sebanyak 4 sasaran strategis yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Sintang. Masing-masing sasaran yang telah ditetapkan oleh BKPSDM Kabupaten Sintang tahun 2019 selengkapnya dituangkan dalam formulir Perjanjian Kinerja dibawah ini :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Valid dan berkualitas serta layanan Administrasi Kepegawaian yang Handal dan Profesional	1. Prosentase Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	100	%
		a. Jumlah Sinkronisasi Data Pegawai ASN	3	Dokumen
		b. Jumlah Penyelesaian Permasalahan Database SAPK	50	PNS
		c. Jumlah penyeragaman infrastruktur SIMPEG Online	1	Paket
		2. Prosentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100	%
		a. Jumlah berkas usulan SK Kenaikan Pangkat Pegawai ASN	3000	Berkas
		b. Jumlah berkas usulan SK Pensiun	300	Berkas
		c. Jumlah penyelesaian Permasalahan KPE	5796	KPE
		d. Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran	17	Jenis
		e. Jumlah Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan	5	Jenis

		f. Jumlah Dokumen pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Dokumen
2	Terwujudnya Peningkatan kualitas kebijakan Rekrutmen dan Penetapan penempatan Pegawai ASN yang Profesional	1. Prosentase Rekrutmen Pegawai ASN a. Jumlah peserta seleksi CPNS b. Jumlah peserta seleksi PPPK c. Penganta Tugas CPNS	100 3200 200 192	% Peserta Peserta CPNS
		2. Prosentase Penempatan Pegawai ASN a. Jumlah Mutasi Pegawai b. Jumlah Pegawai ASN yang dilantik dalam Jabatan Struktural c. Jumlah pertimbangan PNS dalam jabatan Struktural dan Fungsional	100 300 50 450	% Berkas PNS PNS
3.	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan Kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan Produktifitas Kinerja layanan Pegawai ASN yang Profesional, Efektif, Efisien, Kreatif, Inovatif dan Visioner	1. Prosentase Peningkatan dan/atau Pengembangan Kapasitas SDM-ASN a. Jumlah PNS lulus seleksi dalam mengikuti Diklat Kepemimpinan b. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural c. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Formal d. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional e. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Bendahara Daerah f. Jumlah Proses Surat Tugas Diklat Teknis /	100 75 13 12 15 3 150	% PNS PNS PNS PNS PNS Berkas

		Fungsional beban OPD		
		g. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	192	CPNS
		h. Jumlah Pejabat eselon yang mengikuti Test Kompetensi	50	PNS
		i. Jumlah PNS yang diterima sebagai Mahasiswa Tugas Belajar	6	PNS
		j. Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah	75	PNS
		k. Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Ujian Dinas	20	PNS
4.	Terwujudnya Peningkatan pembinaan dan pengembangan Manajemen Kepegawaian yang berkelanjutan guna membangun komitmen integritas dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup pegawai ASN	1. Prosentase Kualitas Kesejahteraan Hidup Pegawai-ASN	100	%
		a. Jumlah PNS yang mengikuti Pembekalan Purna Tugas	250	PNS
		b. Jumlah pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	250	PNS
		c. Jumlah Proses penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala	3000	Berkas
		d. Jumlah proses pengelolaan penyelesaian cuti	500	Berkas
		e. Jumlah proses penyelesaian Kartu Taspen dan Pensiun Pegawai	450	Berkas
		f. Jumlah pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Iktan Dinas	35	ASN
		g. Jumlah pemberian Bantuan Ijin Belajar	11	ASN

		S2		
		h. Jumlah PNS yang menerima Karpeg, Karis dan Karsu	250	Usulan
		i. Jumlah Kegiatan Kopri	2	Kegiatan
		j. Jumlah pengadaan Pakaian Dinas	60	ASN
		2. Prosentase Pembinaan Disiplin Pegawai ASN	100	%
		a. Jumlah PNS yang melaporkan LHKPN	142	PNS
		b. Jumlah Penanganan Kasus pelanggaran Disiplin PNS	20	Kasus
		c. Jumlah Kasus penanganan dan perceraian Rumah Tangga PNS	20	Kasus
		d. Jumlah PNS yang mengikuti Pembinaan Kode Etik	70	PNS
		e. Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah Janji PNS	420	PNS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Sintang, perjanjian kinerja tahun 2019 didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Program dan kegiatan Tahun 2019

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi kantor 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12. Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan kedalam daerah 13. Penyediaan Tenaga Kontrak 14. Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan Gas 15. Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor 16. Penataan Dokumen/Arsip
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan perangkat komputer dan printer 2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer
3	Program peningkatan disiplin aparatur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3. Penyusunan LAKIP 4. Penyusunan RKA SKPD
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah 2. Pendidikan dan pelatihan formal 3. Pengiriman Peserta Diklat Teknis Kediklatan 4. Tim seleksi peserta Diklat kepemimpinan tingkat II, III dan IV 5. Pembekalan bagi Purna Tugas PNS/Kopri 6. Diklat Kompetensi Bendahara 7. Pelatihan Dasar Golongan III 8. Pelatihan Dasar Golongan II
6	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/pengembangan Simpeg Daerah 2. Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 3. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 4. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 5. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 6. Koordinasi penyelenggaraan Diklat 7. Usul kenaikan pangkat PNS 8. Mutasi pindah PNS 9. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 10. Penyelesaian kenaikan gaji berkala 11. Penyelesaian pengurusan SK pemberhentian dengan hormat dengan Hak Pensiun

		<ul style="list-style-type: none"> 12. Pelantikan dan sumpah/janji Jabatan Struktural 13. Ujian Dinas 14. Pemberian bantuan Ijin Belajar S2 15. Penyelesaian pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu 16. Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional 17. Pelaksanaan Perhimpunan LHKPN 18. Inventarisasi dan pemetaan PNS Potensial di Lingkungan PemKab. Sintang 19. Proses penanganan pemberian izin perceraian PNS 20. Pengelolaan dan penyelesaian cuti PNS 21. Penyelesaian Kartu Taspen, Penyelesaian Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda 22. Pengambilan Sumpah Janji PNS di Lingkungan Pemkab Sintang 23. Pengelolaan dan Pengembangan Kopri 24. Seleksi terbuka Jabatan Struktural 25. Rekon database Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN 26. Penyelesaian permasalahan KPE 27. Pembinaan Kode Etik PNS 28. Sinkronisasi Data ASN 29. Pengantar Tugas dan Penyerahan SK ASN 30. Seleksi Penerimaan Calon PPPK 31. Seleksi Penerimaan CPNS
7	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pameran Pembangunan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana/target dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya, semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pula kinerja, hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang digunakan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Skala Pengukuran Ordinal	Keterangan
85 s/d 100	Sangat Berhasil
70 s/d 85	Berhasil
55 s/d 70	Cukup Berhasil
0 s/d 55	Tidak Berhasil

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu :

Skala Pengukuran Ordinal	Keterangan
92,5 %	Sangat Berhasil
77,5 %	Berhasil
62,5 %	Cukup Berhasil
27,5 %	Tidak Berhasil

Nilai akhir capaian (persent) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut.

$$\text{Rumus} = \frac{(\text{Jumlah Nilai Kelompok Kategori} \times \text{Mean Kategorinya})}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100\%$$

b. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sintang. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar

didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran, dan sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcome*).

Pengukuran Kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Indikator input adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besaran dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan, seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Diklat, Laporan Pelaksanaan Pelantikan, Laporan Usulan Kenaikan Pangkat, Laporan Usulan Pensiun, Laporan Usulan Taspen, Laporan Usulan Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya, Laporan Usulan Penyelesaian Karpeg, Karis dan Karsu, Laporan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Laporan Penerbitan SK KGB dan sebagainya. Indikator outcome adalah yang menggambarkan berfungsinya suatu output, antara lain prosentase peningkatan jumlah PNS yang indisipliner yang dijatuhi hukuman disiplin atau prosentase meningkatnya pelayanan kepada ASN.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja pada level sasaran BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

No.	Sasaran Strategis	Nilai Capaian (%)	Skala Pengukuran Ordinal			
			85 s/d 100	70 s/d 85	55 s/d 70	0 s/d 55
			SB	B	CB	TB
1.	Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Valid dan Kerkualitas serta Layanan Administrasi Kepegawaian yang Handal dan Profesional	97,62	SB			
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Rekrutman dan Penempatan Pegawai ASN yang Profesional	91,17	SB			
3.	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas SDM-Pegawai ASN yang Berkelanjutan guna Mengoptimalkan Kinerja Layanan Pegawai ASN yang Profesional, Efektif, Efisien, Kreatif, Inovatif dan Visioner	87,58	SB			
4.	Terwujudnya Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Kepegawaian yang Berkelanjutan guna Membangun Komitmen Integritas dan Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Hidup Pegawai ASN	89,21	SB			
Rata-rata Prosentase Sasaran		91,39	SB			

Dari 4 (empat) sasaran yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Sangat Berhasil : 4 sasaran

Berhasil : - sasaran

Cukup Berhasil : - sasaran

Tidak Berhasil : - sasaran

Jumlah : 4 Sasaran

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada bagian evaluasi kinerja berikut ini:

Sasaran 2. Terwujudnya peningkatan kualitas kebijakan rekrutman dan Penempatan Pegawai ASN yang Profesional.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD Tahun 2018 sebesar **Rp. 841,377,800.00** telah terealisasi senilai **Rp. 827,507,797.00** atau **98,35 %** dari pagu anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi
Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas kebijakan rekrutman dan Penempatan Pegawai ASN yang Profesional.

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Seleksi penerimaan calon PNS	0.00	394,955,150.00	227,930,323.00	57.71%
	Seleksi penerimaan PPPK	0.00	394,982,950.00	100,445,078.00	25.43%
	Pengantar Tugas dan Penyerahan SK ASN	0.00	54,658,500.00	51,838,500.00	94.84%
	Mutasi Pindah PNS	50,954,650.00	69,486,650.00	50,354,650.00	98.82%
	Pelantikan dan Sumpah/Janji Jabatan Struktural	38,690,000.00	32,470,000.00	33,164,000.00	81.13%
	Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional	102,395,750.00	168,842,000.00	149,320,657.00	100.00%
	JUMLAH	192,040,400.00	1.086,264,900.00	613,053,208.00	56.44%

Sumber : Laporan Keuangan BKPSDM Tahun 2019

Kinerja sasaran “Terwujudnya peningkatan kualitas kebijakan rekrutman dan Penempatan Pegawai ASN yang Profesional”, dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Capaian Kinerja
Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas kebijakan rekrutman dan Penempatan Pegawai ASN yang Profesional.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
1	Prosentase Rekrutman Pegawai ASN	%	100%	85.45%	85.45%	outcome
a.	Jumlah Penerimaan CPNS	Peserta	3200	3131	97.84%	output
b.	Jumlah Penerimaan PPPK	Peserta	200	117	58.50%	output
c.	Pengantar Tugas dan Penyerahan SK CPNS	CPNS	192	92	100%	output
2	Prosentase Penempatan Pegawai ASN	%	100%	96.89%	96.89%	outcome
a.	Jumlah Mutasi Pegawai	Berkas	300	290	96.67%	output
b.	Jumlah Pegawai ASN yang dilantik dalam Jabatan Struktural	PNS	50	48	96.00%	output
c.	Jumlah Pertimbangan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional	PNS	450	441	98.00%	output

Sumber : Pengukuran Kinerja BKPSDM Tahun 2019

Dilihat dari capaian sasaran outcome/output yang didukung dengan 2 Indikator Kinerja Utama di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut dapat dikategorikan **berhasil (91,17 %)**, dengan uraian sebagai berikut:

a) Prosentase Rekrutman Pegawai ASN

Realisasi/capaian indikator kinerja utama prosentase rekrutman pegawai ASN sebesar 85.45 %, realisasi ini dapat dirincikan sebagai berikut:

1) Jumlah peserta seleksi CPNS

Realisasi kinerja/capaian kinerja pada jumlah peserta seleksi CPNS pada tahun 2019 sebesar 97.84 %. Hal dapat dilihat dari realisasi jumlah

peserta seleksi CPNS sebanyak 3.131 peserta dari target sebanyak 3.200 jumlah peserta seleksi CPNS. Jumlah peserta ini dilihat dari jumlah pendaftar CPNS melalui kerjasama dengan PT. Pos Indonesia Sintang selaku penerima kiriman surat lamaran peserta CPNS. Dalam seleksi CPNS tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sintang menerima formasi sebanyak 249 CPNS yang terdiri dari:

- Formasi Tenaga Teknis sejumlah 108 CPNS
- Formasi Tenaga Kesehatan sejumlah 60 CPNS
- Formasi Tenaga Guru 81 CPNS

2) Jumlah peserta seleksi PPPK

Realisasi kinerja/capaian kinerja pada jumlah peserta seleksi CPPPK pada tahun 2019 sebesar 58.50 %. Hal dapat dilihat dari realisasi jumlah peserta seleksi CPPPK sebanyak 117 peserta dari target sebanyak 200 peserta. Jumlah peserta ini dilihat dari jumlah pendaftar CPPPK melalui lamaran yang disampaikan melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). Dari jumlah lamaran tersebut hanya 62 peserta yang lulus passing grade melalui seleksi dengan system CAT yaitu Guru sebanyak 44 peserta dan Penyuluh Pertanian sebanyak 18 peserta. Proses lebih lanjut tentang CPPPK masih menunggu regulasi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat (BKN).

3) Pengantar tugas dan penyerahan SK CPNS

Realisasi kinerja/capaian kinerja pada Pengantar tugas dan penyerahan SK CPNS sebesar 100 %. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sebanyak 192 peserta dari target sebesar 192 peserta.

b) Prosentase Penempatan Pegawai ASN

Realisasi/capaian kinerja Indikator Kinerja Utama persentase penempatan Pegawai ASN sebesar 96,89 % dengan rincian:

1) Jumlah Mutasi Pegawai

Realisasi/capaian kinerja jumlah Mutasi Pegawai sejumlah 290 berkas dari target sebesar 300 PNS (berkas) atau 96,67 %,

- Mutasi antar instansi sebanyak 226 PNS/Berkas
- Mutasi Keluar Daerah sebanyak 42 PNS/Berkas
- Mutasi Kedalam Daerah sebanyak 22 PNS/Berkas.

2) Jumlah pegawai ASN yang dilantik dalam Jabatan Struktural

Realisasi/capaian kinerja jumlah pegawai ASN yang dilantik dalam jabatan sebesar 54 PNS dari target sebesar 50 PNS atau 96 %, yaitu pejabat Eselon III/a, III/b dan IV/a pada:

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang
- Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sintang

3) Jumlah Pertimbangan PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional

Realisasi/capaian kinerja Pertimbangan PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional sejumlah 441 PNS dari Target sebesar PNS atau 98 % yaitu :

- Pertimbangan dan Penguohan serta pengisian jabatan Struktural/ Pejabat Eselon II sebanyak 3 PNS.
- Pertimbangan Mutasi/alih tugas PNS dari jabatan fungsional ke jabatan struktural sebanyak 9 PNS, jumlah yang disetujui sebanyak 5 PNS.
- Pengunduran diri PNS dari Jabatan Struktural menjadi Fungsional sebanyak 3 PNS.
- Mutasi, pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan pengawas, kepala sekolah SD dan SMP sebanyak 2 PNS.
- Kepala SD yang diberhentikan karena batas masa periode jabatan sebanyak 2 PNS.

Tabel 3.9
 Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2017, 2018 dan 2019
 Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas kebijakan rekrutman
 dan Penempatan Pegawai ASN yang Profesional.

NO	SASARAN STRATEGI	IKU	REALISASI			TARGET 2020
			2017	2018	2019	
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Rekrutman dan Penetapan Penempatan Pegawai ASN yang Profesional	Prosentase Rekrutman Pegawai ASN	91.80%	97.46%	85,45	100%
		Jumlah Seleksi Penerimaan CPNS	0	3411	3131	2940
		Jumlah Seleksi Penerimaan CPNS	0	0	117	200
		Jumlah CPNS yang mengikuti Pengantar Tugas	336	0	192	249
		Prosentase Penempatan Pegawai ASN	86.89%	50.21%	96,89 %	100%
		Jumlah Mutasi Pegawai	184	137	290	275
		Jumlah Pegawai ASN yang dilantik dalam Jabatan Struktural	757	3	48	44
		Jumlah Pertimbangan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional	990	18	441	100

Sumber : Pengukuran Kinerja BKPSDM Tahun 2017, 2018 dan 2019

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prosentase Rekrutman Pegawai ASN pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 12,01%. Penurunan jumlah tersebut dipengaruhi:
 - a) Realisasi/capaian kinerja seleksi penerimaan CPNS yang mengalami penurunan sebesar 0,39 %.
 - b) Tidak dilaksanakannya **seleksi penerimaan CPPP** pada tahun 2018 (0 %) sedangkan realisasi/capaian kinerja jumlah seleksi penerimaan CPPP pada tahun 2019 realisasinya hanya 117 peserta dari target sebesar 200 peserta atau 58,50%.

Realisasi kinerja/capaian kinerja jumlah CPNS yang mengikuti Pengantar Tugas dan penyerahan SK CPNS tidak mengalami perubahan dari tahun lalu.

2. Dibandingkan realisasi kinerja/capaian kinerja tahun 2018, prosentase realisasi kinerja/capaian kinerja Penempatan Pegawai ASN tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 45,93%. Ada beberapa Indikator Kinerja tahun 2019 yang mempengaruhi kenaikan realisasi kinerja/capaian kinerja yaitu:
 - a. Realisasi/capaian kinerja Mutasi Pegawai pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 51 %
 - b. Realisasi/capaian kinerja pertimbangan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 90,80%. Kenaikan yang sangat signifikan ini dikarenakan pada tahun lalu (2018) tidak adanya mutasi jabatan (hanya mencapai 7,20%)
 - c. Jumlah ASN yang dilantik dalam jabatan struktural hanya mengalami penurunan 4 %.

Secara keseluruhan Sasaran “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Rekrutman dan Penetapan Penempatan Pegawai ASN yang Profesional”, mengalami **penurunan** realisasi kinerja/capaian kinerja sebesar **16,96 %**. Hal ini dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019, realisasi kinerja/capaian kerjanya sebesar 91,17 %, sedangkan pada tahun 2018 realisasi kinerja/capaian kerjanya hanya sebesar 74,21%.

Sasaran 3. “Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan kinerja layanan pegawai ASN yang professional, efektif, efisien, kreatif, inovatif dan visioner”,.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD Tahun 2019 sebesar **Rp. 3,774.601,520.00** telah terealisasi senilai **Rp. 3,611,5326,092.00** atau **95,677 %** dari pagu anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi
Sasaran Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan kinerja layanan pegawai ASN yang professional, efektif, efisien, kreatif, inovatif dan visioner

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	716,819,000.00	679,506,250.00	669,061,269.00	98.46%
	Pendidikan dan pelatihan formal	150,660,000.00	111,027,000.00	105,465,600.00	94.99%
	Pengiriman Peserta Diklat Teknis Kediklatan	42,020,000.00	48,790,000.00	47,332,000.00	97.01%
	Tim Seleksi Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV	35,972,000.00	35,972,000.00	35,672,000.00	99.17%
	Diklat Kompetensi Bendahara	138,821,000.00	138,821,000.00	138,112,000.00	99.49%
	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	1,500,933,210.00	1,559,813,370.00	1,540,360,935.00	98.75%
	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II	401,514,500.00	391,195,800.00	388,076,149.00	99.20%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Koordinasi Penyelenggaraan Diklat	75,000,000.00	72,145,000.00	70,861,700.00	98.22%

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah	55,591,250.00	55,591,250.00	48,908,354.00	87.98%
	Ujian Dinas	52,456,650.00	52,456,650.00	51,105,202.00	97.42%
	Inventarisasi Dan Pemetaan PNS Potensial Di Lingkungan PemKab. Sintang	192,160,000.00	252,060,000.00	139,195,000.00	55.22%
	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	70,532,500.00	120,322,500.00	120,313,022.00	99.99%
	Seleksi Terbuka Jabatan Struktural	220,540,000.00	256,900,700.00	256,862,861.00	99.99%
	JUMLAH	3,653,020,110.00	3,774,601,520.00	3,611,326,092.00	95.67%

Kinerja sasaran “Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan kinerja layanan pegawai ASN yang professional, efektif, efisien, kreatif, inovatif dan visioner”, dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Capaian Kinerja
Sasaran Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan kinerja layanan pegawai ASN yang professional, efektif, efisien, kreatif, inovatif dan visioner

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase Peningkatan dan/atau Pengembangan Kapasitas SDM- ASN	%	100%	88,18 %	88,79 %	Outcome
a	Jumlah PNS dalam Pertimbangan PNS mengikuti Diklat Kepemimpinan	PNS	75	74	99 %	Output
b	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural	PNS	13	13	100%	Output

c	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Formal	PNS	12	8	66,67 %	Output
d	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional penyelenggara Diklat	PNS	15	13	86,67 %	Output
g	Diklat Bendahara Daerah	PNS	2	2	100%	Output
h	Jumlah proses Surat Tugas Diklat Teknis/Fungsional beban OPD	Berkas	150	145	96.67 %	Output
i	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	CPNS	192	192	100%	Output
j	Jumlah Pejabat Eselon yang mengikuti test kompetensi	PNS	50	50	100%	Output
k	Jumlah PNS yang diterima sebagai mahasiswa Tugas Belajar	PNS	6	5	83.33%	Output
l	Jumlah Pegawai PNS yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah	PNS	75	61	81.33%	Output
m	Jumlah Pegawai PNS yang mengikuti Ujian Dinas	PNS	20	10	50 %	Output

Dilihat dari capaian sasaran outcome/output yang dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut dapat dikategorikan sangat berhasil (88.21%) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Jumlah Pertimbangan PNS yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Realisasi kinerja/capaian kinerja sebesar 99 % yaitu indikator kinerja berupa jumlah PNS dalam pertimbangan untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan sebanyak 74 PNS dari target sebanyak 75 PNS, dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah PNS dalam pertimbangan untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II sebanyak 4 PNS
- Jumlah PNS dalam pertimbangan untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 16 PNS

- Jumlah PNS dalam pertimbangan untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 55 PNS

2) Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Struktural

Capaian kinerja sebesar 100 % yaitu indikator kinerja berupa Diklat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang ditargetkan 13 orang terealisasi 13 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Diklat Kepemimpinan Tingkat II sebanyak 0 PNS
- Diklat kepemimpinan Tingkat III sebanyak 6 PNS
- Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 7 PNS

3) Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Formal

Capaian kinerja sebesar 66,67 % yaitu indikator kinerja berupa jumlah PNS yang mengikuti Diklat Formal sejumlah 8 PNS dari target sejumlah 12 orang, dengan rincian:

- Diklat/Bimtek Aset Daerah sebanyak 4 PNS
- Diklat/Bimtek Aplikasi SIMARDI sebanyak 2 Orang
- Diklat/Bimtek Simral sebanyak 1 orang
- Diklat Calon Analisis Kepegawaian sebanyak 1 orang

4) Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Fungsional penyelenggara Diklat

Capaian kinerja sebesar 86,67 % yaitu indikator kinerja berupa jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional Penyelenggara Diklat sejumlah 13 PNS dari target sejumlah 15 orang, dengan rincian:

- Bimtek penguji diklat latsar sebanyak 3 PNS
- Bimtek elektronik perkantoran sebanyak 10 PNS

5) Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Bendahara

Capaian kinerja sebesar 100% yaitu indikator kinerja berupa jumlah PNS yang mengikuti Bendahara sejumlah 2 PNS dari target sejumlah 2 PNS.

6) Jumlah Proses Surat Tugas Diklat Teknis/Fungsional beban OPD

Capaian kinerja sebesar 96,67 % yaitu indikator kinerja berupa Jumlah Proses Surat Tugas Diklat Teknis/Fungsional beban OPD sebanyak 145 berkas Surat Tugas dari target sejumlah 150 berkas Surat Tugas.

7) Jumlah CPNS yang Mengikuti Diklat Prajabatan

Capaian kinerja sebesar 100 % yaitu indikator kinerja berupa jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan sejumlah 192 PNS dari target sejumlah 192 yang terdiri dari :

- a) Golongan III sebanyak CPNS, terdiri dari
 - Tenaga Guru sebanyak 75 CPNS
 - Tenaga Kesehatan sebanyak 10 CPNS
 - Tenaga Teknis sebanyak 73
- b) Golongan II sebanyak 34 CNS, terdiri dari:
 - Tenaga Kesehatan sebanyak 31 CPNS
 - Tenaga Teknis sebanyak 3 CPNS

8) Jumlah Pejabat Eselon yang Mengikuti Test Kompetensi

Capaian kinerja sebesar 100 % yaitu indikator kinerja berupa jumlah Pejabat Eselon yang mengikuti test kompetensi sejumlah 50 PNS dari target sejumlah 50 PNS. Kegiatan tersebut merupakan test kompetensi bagi pejabat eselon II/b sebanyak 50 peserta untuk 9 formasi Jabatan eselon II/b.

9) Jumlah PNS yang Diterima sebagai Mahasiswa Tugas Belajar

Capaian kinerja sebesar 83,33 % yaitu indikator kinerja berupa jumlah PNS yang diterima sebagai mahasiswa tugas belajar sejumlah 5 PNS dari target sejumlah 6 PNS.

10) Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Capaian kinerja sebesar 81,33 % yaitu indikator kinerja berupa jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sejumlah 61 PNS dari target sejumlah 75 PNS.

11) Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas

Capaian kinerja sebesar 50 % yaitu indikator kinerja berupa jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas sejumlah 10 PNS dari target sejumlah 20 PNS.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017, 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017, 2018 dan Target 2019
 Sasaran Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan kinerja layanan pegawai ASN yang profesional, efektif, efisien, kreatif, inovatif dan visioner

NO	SASARAN STRATEGI	IKU	REALISASI			TARGET 2020
			2017	2018	2019	
3	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan Produktifitas Kinerja Layanan Pegawai ASN yang Profesional, Efektif, Efisien, Kreatif, Inovatif dan Visioner	Prosentase Peningkatan dan/atau Pengembangan Kapasitas SDM- ASN	97,38%	74,46%	88,79 %	100%
		Jumlah PNS dalam Pertimbangan untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan	36	23	74	13
		Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural	36	23	13	13
		Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Formal	8	12	8	8
		Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional penyelenggara Diklat	4	20	13	5
		Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kompetensi Bendahara	0	2	2	3
		Jumlah proses Surat Tugas Diklat Teknis/Fungsional beban OPD	50	53	145	60
		Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	79	254	192	250
		Jumlah Pejabat Eselon yang mengikuti test kompetensi	73	24	50	32
		Jumlah PNS yang diterima sebagai mahasiswa Tugas Belajar	5	8	5	6
			Jumlah Pegawai PNS yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah	253	66	61
	Jumlah Pegawai PNS yang mengikuti Ujian Dinas	31	10	10	35	

Pada tahun 2018 realisasi/capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan kinerja layanan pegawai ASN yang professional, efektif, efisien, kreatif, inovatif dan visioner sebesar 74,46 % dan pada tahun 2019 sebesar 87,58 % dan mengalami kenaikan capaian kinerja sebesar **7,80 %**. Beberapa indikator yang menyebabkan kenaikan tersebut yaitu :

- 1) Jumlah proses surat tugas diklat teknis/fungsional beban OPD mengalami kenaikan sebesar 8,34 %. Hal ini dapat dilihat bahwa realisasi kinerja/capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 96,67 %, sedangkan pada tahun 2018 realisasi kinerja/capaian kinerja hanya sebesar 88,33 % atau naik sebesar 8,34 %.
- 2) Jumlah pejabat eselon yang mengikuti test kompetensi mengalami kenaikan sebesar 67,00 %. Hal ini dapat dilihat bahwa realisasi kinerja/capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100 %, sedangkan pada tahun 2018 realisasi kinerja/capaian kinerja hanya sebesar 33 % atau naik sebesar 67 %.
- 3) Jumlah pegawai PNS yang mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah mengalami kenaikan sebesar 48,33 %. Hal ini dapat dilihat bahwa realisasi kinerja/capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 81,33 %, sedangkan pada tahun 2018 realisasi kinerja/capaian kinerja hanya sebesar 33 % atau naik sebesar 48,33 %.
- 4) Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas mengalami kenaikan sebesar 21,43%. Hal ini dapat dilihat bahwa realisasi kinerja/capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 50 %, sedangkan pada tahun 2018 realisasi kinerja/capaian kinerja hanya sebesar 28,57 % atau naik sebesar 21,43%.

Beberapa indikator yang mengalami penurunan yaitu

- 1) Jumlah PNS dalam pertimbangan untuk mengikuti diklat kepemimpinan, turun sebesar 1,33 %.
- 2) Jumlah PNS yang mengikuti diklat formal, turun sebesar 33,33 %.
- 3) Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis penyelenggara diklat 13,33 %.
- 4) Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan, turun sebesar 1,00 %
- 5) Jumlah PNS yang diterima sebagai mahasiswa tugas belajar, turun sebesar 50,00%.

Sedangkan jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Diklat Bendahara Daerah tidak mengalami kenaikan/penurunan (0%).

Sasaran 4. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengembangan manajemen kepegawaian yang berkelanjutan guna membangun komitmen integritas dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup pegawai ASN.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD Tahun 2019 sebesar **Rp.1,913,799,890.00** telah terealisasi senilai **Rp. 1,879,240,495.00** atau **98.19%** dari pagu anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

Tabel 3.13
Anggaran dan Realiasi
Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengembangan manajemen kepegawaian yang berkelanjutan guna membangun komitmen integritas dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup pegawai ASN.

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	100%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pembekalan bagi Purna Tugas PNS/Korpri	100,000,190.00	99,999,390.00	97,434,643.00	97.44%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	78,800,000.00	87,860,000.00	71,301,340.00	81.15%
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	50,380,000.00	86,520,000.00	82,694,016.00	95.58%
	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	1,411,228,600.00	1,015,550,000.00	1,014,222,500.00	99.87%
	Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%
	Pemberian Bantuan Ijin Belajar S-2	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	100.00%
	Penyelesaian Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu	45,978,000.00	72,103,000.00	69,046,000.00	95.76%

	Pelaksanaan Perhimpunan LHKPN	49,995,250.00	49,790,250.00	48,002,586.00	96.41%
	Proses Penanganan Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil	29,327,500.00	27,127,500.00	27,127,500.00	100.00%
	Pengelolaan dan Penyelesaian Cuti PNS	49,800,500.00	49,800,500.00	49,560,500.00	99.52%
	Penyelesaian Kartu Taspen, Penyelesaian Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda	26,355,500.00	26,355,500.00	26,354,660.00	100.00%
	Pengambilan Sumpah Janji PNS di Lingkungan Pemkab Sintang	59,943,750.00	51,023,750.00	50,843,750.00	99.65%
	Pengelolaan dan Pengembangan Korpri	50,000,000.00	70,000,000.00	69,503,800.00	99.29%
	Pembinaan Kode Etik PNS	71,852,000.00	77,670,000.00	73,149,200.00	94.18%
	Jumlah.....	2,223,661,290.00	1,913,799,890.00	1,879,240,495.00	98.19%

Sumber : Laporan Keuangan BKPSDM 2019

Kinerja sasaran “Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengembangan manajemen kepegawaian yang berkelanjutan guna membangun komitmen integritas dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup pegawai ASN”, dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.14

Target dan Realiasi/Capaian Kinerja
Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengembangan manajemen kepegawaian yang berkelanjutan guna membangun komitmen integritas dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup pegawai ASN

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase Kualitas Kesejahteraan Hidup Pegawai- ASN	%	100%	89.75%	89.75%	Outcome

a.	Pembekalan PNS yang akan purna tugas	PNS	250	241	96,40%	Output
b.	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	PNS	250	238	95.20%	Output
c.	Jumlah PNS yang mendapat SK Kenaikan Gaji Berkala	Berkas	3000	2.822	94,07%	Output
d.	Jumlah Pengelolaan dan Penyelesaian Cuti	Berkas	500	456	91.20%	Output
e.	Penyelesaian Kartu Taspen dan Pensiun Pegawai	Berkas	450	433	96 %	Output
f.	Jumlah PNS yang Mendapat Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	PNS	35	32	91.43%	Output
g.	Jumlah PNS yang mendapat Bantuan Ijin Belajar S2	PNS	11	11	100%	Output
h.	Jumlah PNS yang menerima Karpeg/Karis, Karsu	Berkas	250	208	83.20%	Output
i.	Pelaksanaan kegiatan korpri	Kegiatan	2	2	100%	Output
j.	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Stell	60	60	100%	Output
2	Prosentase Pembinaan Disiplin Pegawai- ASN	%	100%	83.64%	83.64%	outcome
a.	Jumlah PNS yang melaporkan LHKPN	Dokumen	142	107	75.35 %	Output
b.	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Kasus	20	14	70.00 %	Output
c.	Jumlah Penanganan dan Pembinaan Kasus Ijin Perceraian Rumah Tangga PNS	Kasus	20	16	80.00 %	Output
d.	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Kode Etik	PNS	70	65	92.86 %	Output
e.	Sumpah Janji PNS	PNS	420	420	100 %	Output

Sumber : Pengukuran Kinerja BKPSDM 2019

Realiasi/capaian kinerja “terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengembangan manajemen kepegawaian yang berkelanjutan guna membangun komitmen integritas dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup pegawai

ASN” dipengaruhi oleh 2 Indikator Kinerja Utama yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Prosentase Kualitas Kesejahteraan Hidup Pegawai- ASN

Realiasi/capaian kinerja kualitas kesejahteraan hidup pegawai ASN pada tahun 2019 mencapai 89,75 %, hal ini dipengaruhi oleh indikator kinerja sebagai berikut:

1) Pembekalan PNS Yang Akan Purna Tugas

Realisasi/capaian kinerja pembekalan PNS yang akan purna tugas sebesar 96,40 %. Hal ini dapat dilihat dari PNS yang akan pensiun pada tahun 2020 yang mengikuti pembekalan sebanyak 241 PNS dari target sebanyak 250 PNS.

2) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Realisasi/capaian kinerja Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi berupa Usulan Penganugerahan Satya Lancana Karya Satya bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang mencapai 95,20 %. Hal ini dapat dilihat dari jumlah PNS yang mendapat Piagam Penghargaan sebanyak 238 PNS dari target sebesar 250 PNS. Jumlah piagam penghargaan **Satya Lancana Karya Satya** dengan rincian:

- Satya Lancana Karya Satya untuk 30 Tahun sebanyak 103 PNS
- Satya Lancana Karya Satya untuk 20 Tahun sebanyak 65 PNS
- Satya Lancana Karya Satya untuk 10 Tahun sebanyak 70 PNS

3) Jumlah PNS yang menerima mendapat SK Kenaikan Gaji Berkala

Realisasi/capaian kinerja penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala (KGB) mencapai 94,07 %. Hal ini dapat dilihat dari berkas usulan dan penyelesaian KGB sebanyak 2.822 PNS dari target sebesar 3.000 PNS.

4) Jumlah PNS yang menerima cuti PNS

Realisasi/capaian kinerja Jumlah PNS yang menerima cuti PNS mencapai 91,20 %. Hal ini dapat dilihat dari usulan dan penyelesaian Cuti PNS sebanyak 456 PNS dari target sebesar 500 PNS.

5) Jumlah PNS dalam penyelesaian Kartu Taspen dan pensiun

Realisasi/capaian kinerja jumlah CPNS/PNS yang mengusulkan Kartu Taspen dan pensiun mencapai 96 %. Hal ini dapat dilihat dari usulan dan penyelesaian sebanyak 433 PNS/pensiun dari target sebesar 450 PNS/pensiun, dengan rincian:

- Taspen BUP sebanyak 199 PNS
- Pensiun Janda/Duda sebanyak 27 Pensiun
- Pensiun Atas Permintaan Sendiri sebanyak 6 PNS
- Kartu Taspen CPNS sebanyak 192 CPNS
- Kartu Pensiun PNS sebanyak 9 PNS

6) Jumlah PNS yang mendapat bantuan Tubel dan Ikatan Dinas

Realisasi/capaian kinerja jumlah PNS yang mendapatkan bantuan Tubel dan ikatan dinas tahun 2019 sebanyak 32 PNS dari target sebesar 35 PNS, dengan rincian sebagai berikut:

- PNS Tugas Belajar S2 /Dokter spesialis sebanyak 4 PNS
- PNS Tugas Belajar S2 Tenaga Kesehatan/Umum sebanyak 5 PNS
- PNS Tugas Belajar S2 Tenaga Pendidikan sebanyak 2 PNS
- PNS Tugas Belajar S2 Umum sebanyak 3 PNS
- PNS Tugas Belajar S1 Tenaga Kesehatan sebanyak 2 PNS
- PNS Tugas Belajar S1 Tenaga Pendidikan sebanyak 1 PNS
- PNS Tugas Belajar S1 Umum sebanyak 1 PNS
- PNS Tugas Belajar D IV Tenaga Kesehatan sebanyak 1 PNS
- PNS Tugas Belajar D IV Umum sebanyak 1 PNS
- PNS Tugas Belajar D III Tenaga Kesehatan sebanyak 1 PNS
- Ikatan Dinas D IV IPDN sebanyak 11 Calon Pamong Praja

7) Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan Ijin Belajar S2

Realisasi/capaian kinerja PNS yang mendapatkan bantuan Ijin Belajar S2 tahun 2019 sebesar 100 % atau sebanyak 11 PNS yang terdiri dari :

- bantuan Ijin Belajar S2 sebanyak 10 PNS
- bantuan Ijin Belajar S3 sebanyak 1 PNS.

8) Jumlah PNS yang mendapatkan Karpeg, Karis, Karsu

Realisasi/capaian kinerja PNS yang mendapatkan Karpeg, Karis, Karsu sebesar 83,20 %. Hal ini dapat dilihat dari jumlah usulan dan penyelesaian Karpeg, Karis dan Karsu sebanyak 208 dari target sebesar 250 PNS, dengan rincian sebagai berikut:

- PNS yang mendapatkan Karpeg sejumlah 59 PNS
- PNS yang mendapatkan Karis sejumlah 76 PNS
- PNS yang mendapatkan Karsu sejumlah 73 PNS

9) Pelaksanaan Kegiatan Korpri

Realisasi/capaian kinerja pelaksanaan kegiatan korpri mencapai 100 %. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan yaitu:

- Pelaksanaan POR Korpri di Lampung
- Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Korpri di Kabupaten Sintang

10) Jumlah PNS yang mendapatkan pakaian Dinas

Realisasi/capaian kinerja PNS yang mendapatkan pakaian dinas mencapai 100 %. Hal ini dapat dilihat dari jumlah PNS yang mendapatkan pakaian dinas sebanyak 60 PNS.

b. Prosentase Pembinaan Disiplin Pegawai- ASN

Realisasi/capaian Indikator Kinerja Utama prosentase pembinaan disiplin Pegawai-ASN pada tahun 2019 mencapai **83,64 %**. Hal ini dipengaruhi oleh indikator kinerja sebagai berikut:

1) Jumlah PNS yang Melaporkan LHKPN

Realisasi/capaian kinerja PNS yang melaporkan LHKPN pada system LHKPN-e mencapai 75.35 %. Hal ini dapat dilihat pada system tersebut sebanyak 107 PNS yang sudah melaporkan dari target sebesar 142 PNS yang wajib menyampaikan LHKPN secara elektronik.

2) Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Realisasi/capaian kinerja penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS mencapai **70,00%**. Hal ini dapat dilihat dari penanganan kasus

pelanggaran disiplin PNS sebanyak 14 Kasus dari target sebanyak 20, terdiri dari:

- Penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama selama 3 tahun sebanyak 3 PNS.
- Penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun sebanyak 1 PNS.
- Pembebasan dari jabatan sebanyak 1 PNS
- Pemberhentian sementara sebanyak 1 PNS
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebanyak 4 orang.
- Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan sebanyak 4 PNS

3) Jumlah Penanganan Kasus Ijin Pembinaan dan Perceraian Rumah Tangga PNS

Realisasi/Capaian kinerja Penangan Kasus Ijin Pembinaan dan Perceraian Rumah Tangga PNS mencapai **80,00 %**. Hal ini dapat dilihat dari Penangan Kasus Ijin Pembinaan dan Perceraian Rumah Tangga PNS sebanyak 16 Kasus dari target sebanyak 20 Kasus,

4) Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Kode Etik

Realisasi/capaian kinerja PNS yang mengikuti sosialisasi kode etik mencapai 92,86%. Hal ini dapat dilihat dari PNS yang mengikuti kegiatan dimaksud sebanyak 65 PNS dari target sebesar 70 PNS.

5) Sumpaj Janji PNS

Realisasi/capaian kinerja Sumpah Janji PNS mencapai 100 %. Hal ini dapat dilihat dari jumlah PNS yang mengikuti pengangkatan sumpah janji PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebanyak 420 PNS.

Dari uraian tersebut diatas realisasi/capaian kinerja **“terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengembangan manajemen kepegawaian yang berkelanjutan guna membangun komitmen integritas dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup pegawai ASN”** pada tahun 2019 mencapai **89,21%** atau **Sangat Berhasil**

Adapun perbandingan realisasi/capaian kinerja sasaran **“terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengembangan manajemen kepegawaian yang berkelanjutan guna membangun komitmen integritas dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup pegawai ASN”** dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15
Realiasi/Capaian Kinerja Tahun 2017, 2018 dan Target Tahun 2019
Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengembangan manajemen kepegawaian yang berkelanjutan guna membangun komitmen integritas dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup pegawai ASN

NO	SASARAN STRATEGI	INDEK KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2019
			2017	2018	2019	
1.	Terwujudnya Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Kepegawaian yang Berkelanjutan guna membangun komitmen integritas	Prosentase Kualitas Kesejahteraan Hidup Pegawai- ASN	80,23%	89.75%	89.75%	100 %
a.		Pembekalan Bagi Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS)	63	0	241	250
b.		Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	75	151	238	250

c.	dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup pegawai ASN	Jumlah PNS yang mendapat SK Kenaikan Gaji Berkala	3207	2758	2822	3000
d.		Jumlah Pengelolaan dan Penyelesaian Cuti	476	420	456	500
e.		Penyelesaian Kartu Taspem dan Pensiun Pegawai	300	633	433	500
f.		Jumlah PNS yang Mendapat Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	43	34	32	40
g.		Jumlah PNS yang mendapat Bantuan Ijin Belajar S2	20	20	11	20
h.		Jumlah PNS yang menerima Karpeg/Karis, Karsu	452	586	208	250
i.		Pelaksanaan Kegiatan Korpri	0	0	2	2
j.		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	58	80	60	0
2.		Prosentase Pembinaan Disiplin Pegawai- ASN	49.17%	49.58%	49.58%	100%
a.		Jumlah PNS yang melaporkan LHKPN	18	21	107	142
b.		Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	18	21	14	20
c.		Jumlah Penanganan dan Pembinaan Kasus Ijin Perceraian Rumah Tangga PNS	16	14	16	20
d.		Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Kode Etik	0	0	65	0
e.		Sumpah Janji PNS	0	0	420	250

Dari tabel tersebut di atas realisasi/capaian kinerja sasaran “terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengembangan manajemen kepegawaian yang berkelanjutan guna membangun komitmen integritas dan meningkatkan

kualitas kesejahteraan hidup pegawai ASN” mengalami kenaikan sebesar **19,54%**. Kenaikan ini dipengaruhi oleh indikator kinerja sebagai berikut:

a. Realisasi/capaian kinerja indikator kinerja utama Kualitas Kesejahteraan Hidup Pegawai- ASN mengalami kenaikan sebesar **5,02%**. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Realisasi/capaian kinerjanya mencapai **94,77%** sedangkan pada tahun 2018 realisasi/capaian kinerja hanya sebesar **89,75 %**. Kenaikan ini dipengaruhi oleh indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Realisasi/capaian kinerja pembekalan PNS untuk purna tugas pada tahun 2019 yang mengalami kenaikan sebesar 96,40 % karena pada tahun 2018 realisasi dan targetnya 0%.
- 2) Realisasi/capaian kinerja Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi pada tahun 2019 yang mencapai 95,20% sedangkan pada tahun 2018 hanya mencapai 75,50%, sehingga mengalami kenaikan sebesar 19,70%.
- 3) Realisasi/capaian kinerja PNS yang mendapatkan SK Kenaikan Gaji Berkala pada tahun 2019 yang mencapai 94,07% sedangkan pada tahun 2018 hanya mencapai 91,93%, sehingga mengalami kenaikan sebesar 2,14%.
- 4) Realisasi/capaian kinerja pengelolaan dan penyelesaian cuti pada tahun 2019 yang mencapai 91,20% sedangkan pada tahun 2018 hanya mencapai 70%, sehingga mengalami kenaikan sebesar 21,20%.
- 5) Realisasi/capaian kinerja PNS yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas pada tahun 2019 yang mencapai 91,43 % sedangkan pada tahun 2018 hanya mencapai 85,00%, sehingga mengalami kenaikan sebesar 6,43%.
- 6) Realisasi/capaian kinerja PNS yang menerima Karpeg, Karis dan Karsu pada tahun 2019 yang mencapai 83,20 % sedangkan pada tahun 2018 hanya mencapai 68,94%, sehingga mengalami kenaikan sebesar 14,26%.

- 7) Realisasi/capaian kinerja pelaksanaan kegiatan korpri pada tahun 2019 yang mengalami kenaikan sebesar 100,00% karena pada tahun 2018 realisasi dan targetnya 0%.

Realisasi/capaian kinerja yang tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun lalu (2018) yaitu:

- Jumlah PNS yang mendapat bantuan ijin belajar S2 dan S3
- Jumlah pengadaan pakaian dinas

sedangkan realisasi/capaian kinerja yang mengalami penurunan yaitu jumlah penyelesaian taspen, pensiun, pensiun duda/janda yang mengalami penurunan sebesar **30,78%**. Hal ini dipengaruhi realisasi/capaian kinerja pada tahun 2018 yang mampu mencapai 127% sedangkan pada tahun 2019 menurun dan hanya mencapai 96%.

- b. Realisasi/capaian kinerja indikator kinerja utama prosentase pembinaan disiplin pegawai- ASN mengalami kenaikan sebesar 34,06 %. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 realisasi/capaian kerjanya mampu mencapai 83,64 % sedangkan pada tahun 2018 realisasi/capaian kinerja hanya mencapai 49,58 %. Kenaikan ini dipengaruhi oleh indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Realisasi/capaian kinerja PNS yang melaporkan LHKPN pada tahun 2019 yang mencapai 75,35 %, sedangkan pada tahun 2018 realisasi/capaian kerjanya 0%, sehingga mengalami kenaikan sebesar 75,35%.
- 2) Realisasi/capaian kinerja penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS pada tahun 2019 yang mencapai 70 % sedangkan pada tahun 2018 hanya mencapai 52,50 %, sehingga mengalami kenaikan sebesar 17,50 %.
- 3) Realisasi/capaian kinerja penanganan dan pembinaan kasus ijin perceraian pada tahun 2019 yang mencapai 80 % sedangkan pada tahun 2018 hanya mencapai 46,67 %, sehingga mengalami kenaikan sebesar 33,33 %.

- 4) Realisasi/capaian kinerja PNS yang mengikuti sosialisasi kode etik pada tahun 2019 yang mencapai 92,86 %, sedangkan pada tahun 2018 realisasi/capaian kinerjanya 0%.
- 5) Realisasi/capaian kinerja Sumpah janji PNS pada tahun 2019 yang mencapai 100%, sedangkan pada tahun 2018 realisasi/capaian kinerjanya 0% sehingga mengalami kenaikan sebesar 100 %.

Secara keseluruhan dari 4 sasaran strategis mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya rata-rata sebesar 12,36 % dengan rincian :

1. Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Valid dan Kerkualitas serta Layanan Administrasi Kepegawaian yang Handal dan Profesional, mengalami kenaikan sebesar 5,16%
2. Terwujudnya peningkatan kualitas kebijakan rekrutman dan Penempatan Pegawai ASN yang Profesional, mengalami kenaikan sebesar 16,96 %
3. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan kinerja layanan pegawai ASN yang professional, efektif, efisien, kreatif, inovatif dan visioner, mengalami kenaikan sebesar 7,80 %
4. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengembangan manajemen kepegawaian yang berkelanjutan guna membangun komitmen integritas dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup pegawai ASN, mengalami kenaikan sebesar 19,54 %

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk membiayai program dan kegiatan pada BKPSDM Kabupaten Sintang tahun anggaran 2019, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang tahun anggaran 2019 yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dari dana APBD Kabupaten pada tahun anggaran 2019 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp 13.551.652.510,00**, realisasi anggaran sebesar **Rp.12.172.066.317,00** atau **89,82 %**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Jumlah anggaran belanja tidak langsung BKPSDM Kabupaten Sintang tahun 2019 sebesar **Rp.4.832.104.509,00**, realisasi penyerapan anggarannya sebesar **Rp.4.154.998.458,00** atau **85,99 %**. Jumlah anggaran dan realisasi serta prosentase dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.16

**ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu Anggaran	Prosen tase
1	2	3	4	5	6
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.00.00.5.1] Belanja Tidak Langsung					
5110101	Gaji pokok PNS/uang representasi	2,550,008,475.00	2,393,912,948.00	156,095,527.00	93.88%
5110102	Tunjangan keluarga	290,980,522.00	207,443,598.00	83,536,924.00	71.29%
5110103	Tunjangan jabatan	184,030,000.00	162,750,000.00	21,280,000.00	88.44%
5110104	Tunjangan fungsional	70,710,101.00	41,910,000.00	28,800,101.00	59.27%
5110105	Tunjangan fungsional umum	101,413,570.00	79,905,000.00	21,508,570.00	78.79%
5110106	Tunjangan beras	194,664,960.00	127,169,520.00	67,495,440.00	65.33%
5110107	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	12,617,780.00	2,202,468.00	10,415,312.00	17.46%
5110108	Pembulatan gaji	123,324.00	38,244.00	85,080.00	31.01%
5110109	Jaminan Kesehatan	90,636,341.00	60,988,011.00	29,648,330.00	67.29%
5110122	Jaminan Kematian	23,035,237.00	11,514,402.00	11,520,835.00	49.99%
5110123	Jaminan Keselamatan Kerja	15,721,199.00	5,721,521.00	9,999,678.00	36.39%
5110201	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1,298,163,000.00	1,061,442,746.00	236,720,254.00	81.76%
Sub Jumlah		4,832,104,509.00	4,154,998,458.00	677,106,051.00	85.99%

Sumber : Laporan Keuangan BKPSDM 2019

2. Belanja Langsung

Belanja langsung BKPSDM Kabupaten Sintang tahun anggaran 2019 sebesar **Rp. 8.719.548.001,00**, realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar **Rp.8.017.067.859,00** atau **91,94 %**. Realisasi anggaran sebagaimana tersebut di atas merupakan pengeluaran belanja langsung BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 yang telah dipertanggungjawabkan. Jumlah **Belanja Langsung** secara rinci menurut program dan kegiatannya dirincikan berikut ini :

Tabel 3.17

ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu Anggaran	Prosent ase
1	2	3	4	5	6
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.00.00.5.2] Belanja Langsung					
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.01.001.5.2] Penyediaan jasa surat menyurat					
5220103	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	2,376,000.00	2,376,000.00	0.00	100%
5220307	Belanja Paket/ Pengiriman	4,750,000.00	3,915,500.00	834,500.00	82.43%
Sub Jumlah		7,126,000.00	6,291,500.00	834,500.00	88.29%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.01.002.5.2] Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					
5220301	Belanja telepon/faksimili/Radio	2,400,000.00	1,506,574.00	893,426.00	62.77%
5220303	Belanja Listrik	106,800,000.00	99,548,434.00	7,251,566.00	93.21%
5220306	Belanja internet/bandwitch	9,500,000.00	9,101,140.00	398,860.00	95.80%

Sub Jumlah		118,700,000.00	110,156,148.00	8,543,852.00	92.80%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.01.006.5.2] Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					
5220505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7,125,000.00	4,961,000.00	2,164,000.00	69.63%
Sub Jumlah		7,125,000.00	4,961,000.00	2,164,000.00	69.63%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.01.007.5.2] Penyediaan jasa administrasi keuangan					
5220309	Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Bank	400,000.00	76,500.00	323,500.00	19.13%
Sub Jumlah		400,000.00	76,500.00	323,500.00	19.13%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.01.008.5.2] Penyediaan jasa kebersihan kantor					
5210201	Gaji Pegawai Tidak Tetap	26,461,940.00	26,461,940.00	0.00	100 %
5220330	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	132,312,060.00	132,309,700.00	2,360.00	100 %
Sub Jumlah		158,774,000.00	158,771,640.00	2,360.00	100%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.01.010.5.2] Penyediaan alat tulis kantor					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8,350,000.00	8,350,000.00	0.00	100%
5210102	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	100%
5210104	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	100%
5210107	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	6,100,000.00	6,100,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	84,122,865.00	84,122,865.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	12,732,500.00	12,732,500.00	0.00	100%
Sub Jumlah		122,305,365.00	122,305,365.00	0.00	100%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.01.011.5.2] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					

5220108	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	9,000,000.00	6,240,000.00	2,760,000.00	69.33%
5220601	Belanja Penggandaan	42,780,000.00	42,780,000.00	0.00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	100%
5220603	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	43,910,000.00	43,910,000.00	0.00	100%
Sub Jumlah		97,990,000.00	95,230,000.00	2,760,000.00	97.18%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.01.012.5.2] Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor					
5220102	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	11,996,300.00	11,996,300.00	0.00	100%
Sub Jumlah		11,996,300.00	11,996,300.00	0.00	100%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.01.015.5.2] Penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan					
5220305	Belanja Surat Kabar/Majalah	6,720,000.00	5,980,000.00	740,000.00	88.99%
Sub Jumlah		6,720,000.00	5,980,000.00	740,000.00	88.99%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.01.017.5.2] Penyediaan makanan dan minuman					
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	41,515,000.00	40,581,200.00	933,800.00	97.75%
5221102	Belanja Makanan dan Minuman tamu	532,800.00	0.00	532,800.00	0.00%
Sub Jumlah		42,047,800.00	40,581,200.00	1,466,600.00	96.51%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.01.018.5.2] Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8,535,000.00	8,535,000.00	0.00	100%
5220105	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,098,091.00	2,098,091.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	310,220,000.00	309,689,997.00	530,003.00	99.83%
Sub Jumlah		320,853,091.00	320,323,088.00	530,003.00	99.83%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.01.019.5.2] Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah					

5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,870,000.00	28,867,131.00	2,869.00	99.99%
Sub Jumlah		28,870,000.00	28,867,131.00	2,869.00	99.99%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.01.020.5.2] Penyediaan tenaga kontrak					
5210201	Gaji Pegawai Tidak Tetap	118,800,000.00	117,300,000.00	1,500,000.00	98.74%
5210301	Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	10,050,600.00	9,811,300.00	239,300.00	97.62%
5210302	Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	1,512,000.00	836,640.00	675,360.00	55.33%
5210303	Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00%
Sub Jumlah		130,866,600.00	127,947,940.00	2,918,660.00	97.77%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.01.021.5.2] Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas					
5220105	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25,528,950.00	25,508,259.00	20,691.00	99.92%
Sub Jumlah		25,528,950.00	25,508,259.00	20,691.00	99.92%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.01.022.5.2] Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor					
5220104	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11,226,000.00	11,226,000.00	0.00	100%
Sub Jumlah		11,226,000.00	11,226,000.00	0.00	100%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.01.023.5.2] Penataan dokumen arsip					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	25,180,000.00	25,180,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	197,400.00	197,400.00	0.00	100%
5220104	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	313,000.00	313,000.00	0.00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3,767,400.00	3,767,400.00	0.00	100%

Sub Jumlah		29,457,800.00	29,457,800.00	0.00	100%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.02.011.5.2] Pengadaan perangkat komputer dan printer					
5231201	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	81,650,000.00	81,550,000.00	100,000.00	99.88%
Sub Jumlah		81,650,000.00	81,550,000.00	100,000.00	99.88%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.02.012.5.2] Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor					
5231106	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	47,050,000.00	47,050,000.00	0.00	100%
5231111	Belanja Modal Tenda	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100%
Sub Jumlah		62,050,000.00	62,050,000.00	0.00	100%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.02.024.5.2] Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					
5220501	Belanja Jasa Service	4,200,000.00	185,000.00	4,015,000.00	4.40%
5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	18,000,000.00	17,775,000.00	225,000.00	98.75%
Sub Jumlah		22,200,000.00	17,960,000.00	4,240,000.00	80.90%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.02.026.5.2] Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					
5222002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12,000,000.00	11,900,000.00	100,000.00	99.17%
Sub Jumlah		12,000,000.00	11,900,000.00	100,000.00	99.17%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.02.030.5.2] Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer					
5222002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,400,000.00	4,484,000.00	916,000.00	83.04%
Sub Jumlah		5,400,000.00	4,484,000.00	916,000.00	83.04%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.03.002.5.2] Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					
5221204	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	100%

Sub Jumlah		45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	100%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.06.003.5.2]					
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1,034,970.00	1,034,870.00	100.00	99.99%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	979,500.00	979,500.00	0.00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	660,000.00	660,000.00	0.00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	100%
Sub Jumlah		3,824,470.00	3,824,370.00	100.00	100%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.06.005.5.2]					
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	296,550.00	296,550.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	770,500.00	770,500.00	0.00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	345,000.00	345,000.00	0.00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	75,000.00	75,000.00	0.00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	900,000.00	900,000.00	0.00	100%
Sub Jumlah		5,137,050.00	5,137,050.00	0.00	100%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.06.006.5.2]					
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP)					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	8,890,000.00	8,890,000.00	0.00	100%
5210204	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	470,000.00	470,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	203,000.00	203,000.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	325,000.00	325,000.00	0.00	100%

5220601	Belanja Penggandaan	699,000.00	699,000.00	0.00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	230,000.00	230,000.00	0.00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,437,500.00	1,437,500.00	0.00	100%
Sub Jumlah		12,254,500.00	12,254,500.00	0.00	100.00 %
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.06.010.5.2]					
Penyusunan rencana kerja perangkat daerah					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	714,375.00	713,000.00	1,375.00	99.81%
5220601	Belanja Penggandaan	300,300.00	300,300.00	0.00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	165,000.00	165,000.00	0.00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	546,000.00	546,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,615,000.00	2,675,000.00	940,000.00	74.00%
Sub Jumlah		5,340,675.00	4,399,300.00	941,375.00	82.37%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.16.002.5.2]					
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	524,000.00	524,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	87,120,000.00	85,522,800.00	1,597,200.00	98.17%
5221701	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	390,860,000.00	385,310,000.00	5,550,000.00	98.58%
5222501	Belanja Transportasi	134,402,250.00	131,104,469.00	3,297,781.00	97.55%
5222503	Belanja Uang Saku	58,800,000.00	58,800,000.00	0.00	100%
Sub Jumlah		679,506,250.00	669,061,269.00	10,444,981.00	98.46%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.16.005.5.2]					
Pendidikan dan Pelatihan Formal					

5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,502,000.00	2,502,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	78,225,000.00	72,663,600.00	5,561,400.00	92.89%
5221701	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30,300,000.00	30,300,000.00	0.00	100%
Sub Jumlah		111,027,000.00	105,465,600.00	5,561,400.00	94.99%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.16.007.5.2] Pengiriman Peserta Diklat Teknis Kediklatan					
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45,790,000.00	44,332,000.00	1,458,000.00	96.82%
Sub Jumlah		48,790,000.00	47,332,000.00	1,458,000.00	97.01%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.16.008.5.2] Tim Seleksi Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	34,520,000.00	34,220,000.00	300,000.00	99.13%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1,452,000.00	1,452,000.00	0.00	100%
Sub Jumlah		35,972,000.00	35,672,000.00	300,000.00	99.17%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.16.012.5.2] Pembekalan Bagi Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil/ Korpri					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,460,000.00	2,460,000.00	0.00	100%
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	11,000,000.00	10,980,000.00	20,000.00	99.82%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	468,500.00	468,500.00	0.00	100%
5220210	Belanja Bahan Dekorasi	480,000.00	480,000.00	0.00	100%
5220310	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	690,690.00	690,690.00	0.00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	425,000.00	425,000.00	0.00	100%

5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15,596,000.00	15,596,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38,800,000.00	37,375,253.00	1,424,747.00	96.33%
5222501	Belanja Transportasi	8,559,200.00	8,559,200.00	0.00	100%
5222502	Belanja Akomodasi	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00%
Sub Jumlah		99,999,390.00	97,434,643.00	2,564,747.00	97.44%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.16.016.5.2] Diklat Kompetensi Bendahara					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	4,280,000.00	4,280,000.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	3,361,000.00	3,361,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	103,520,000.00	102,811,000.00	709,000.00	99.32%
5221701	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	23,700,000.00	23,700,000.00	0.00	100%
Sub Jumlah		138,821,000.00	138,112,000.00	709,000.00	99.49%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.16.020.5.2] Pelatihandasar calon pegawai negeri sipil (CPNS) Golongan III					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	100%
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	79,090,000.00	77,490,000.00	1,600,000.00	97.98%
5210204	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	40,921,090.00	40,921,000.00	90.00	100%
5220102	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100%
5220103	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	885,000.00	885,000.00	0.00	100%
5220105	Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	16,850,000.00	13,062,640.00	3,787,360.00	77.52%

5220108	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	720,000.00	720,000.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	100%
5220310	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	384,000,000.00	383,200,000.00	800,000.00	99.79%
5220312	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	100%
5220316	Belanja Jasa Tenaga Pengawas/ Penyelenggaraan Ujian	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100%
5220318	Belanja Jasa Laundry	3,280,000.00	3,200,000.00	80,000.00	97.56%
5220601	Belanja Penggandaan	16,307,280.00	16,307,280.00	0.00	100%
5220603	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	67,876,000.00	67,876,000.00	0.00	100%
5220702	Belanja Sewa Gedung / Kantor	187,404,000.00	187,404,000.00	0.00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	2,610,000.00	2,610,000.00	0.00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	542,366,000.00	541,306,500.00	1,059,500.00	99.80%
5221404	Belanja pakaian olahraga	31,600,000.00	31,600,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53,404,000.00	53,360,500.00	43,500.00	99.92%
5222501	Belanja Transportasi	58,020,000.00	48,114,865.00	9,905,135.00	82.93%
5222502	Belanja Akomodasi	48,000,000.00	45,823,150.00	2,176,850.00	95.46%
Sub Jumlah		1,559,813,370.00	1,540,360,935.00	19,452,435.00	98.75%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.16.021.5.2] Pelatihandasar calon pegawai negeri sipil (CPNS) Golongan II					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	22,590,000.00	22,470,000.00	120,000.00	99.47%
5210204	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	12,880,000.00	12,880,000.00	0.00	100%

5220102	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	100%
5220103	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	795,000.00	795,000.00	0.00	100%
5220105	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	100%
5220108	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	720,000.00	720,000.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	920,000.00	920,000.00	0.00	100%
5220310	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	96,000,000.00	93,600,000.00	2,400,000.00	97.50%
5220312	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	100%
5220316	Belanja Jasa Tenaga Pengawas/ Penyelenggaraan Ujian	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100%
5220318	Belanja Jasa Laundry	320,000.00	320,000.00	0.00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	6,270,000.00	6,270,000.00	0.00	100%
5220603	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	14,648,000.00	14,538,000.00	110,000.00	99.25%
5220702	Belanja Sewa Gedung / Kantor	43,617,000.00	43,617,000.00	0.00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	652,500.00	652,500.00	0.00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	97,548,500.00	97,548,500.00	0.00	100%
5221404	Belanja pakaian olahraga	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45,010,000.00	44,565,000.00	445,000.00	99.01%
5222501	Belanja Transportasi	12,012,000.00	12,011,749.00	251.00	100%
5222502	Belanja Akomodasi	18,702,800.00	18,658,400.00	44,400.00	99.76%
Sub Jumlah		391,195,800.00	388,076,149.00	3,119,651.00	99.20%

[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.005.5.2] Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	784,500.00	784,500.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	240,000.00	240,000.00	0.00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	414,000.00	414,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50,905,000.00	50,586,732.00	318,268.00	99.37%
Sub Jumlah		55,093,500.00	54,775,232.00	318,268.00	99.42%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.007.5.2] Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	100%
5210204	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	736,500.00	736,500.00	0.00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	506,000.00	500,000.00	6,000.00	98.81%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	98,680,000.00	98,676,522.00	3,478.00	100%
Sub Jumlah		120,322,500.00	120,313,022.00	9,478.00	99.99%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.008.5.2] Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	100%
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	13,920,000.00	9,390,000.00	4,530,000.00	67.46%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	879,500.00	879,500.00	0.00	100%
5220209	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	18,750,000.00	18,750,000.00	0.00	100%
5220210	Belanja Bahan Dekorasi	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00%

5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9,400,500.00	0.00	9,400,500.00	0.00%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36,240,000.00	35,681,840.00	558,160.00	98.46%
Sub Jumlah		87,860,000.00	71,301,340.00	16,558,660.00	81.15%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.009.5.2] Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	29,000,000.00	26,800,000.00	2,200,000.00	92.41%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,115,000.00	9,105,000.00	10,000.00	99.89%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46,155,000.00	44,539,016.00	1,615,984.00	96.50%
Sub Jumlah		86,520,000.00	82,694,016.00	3,825,984.00	95.58%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.011.5.2] Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	100%
5221601	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	52,450,000.00	52,450,000.00	0.00	100%
5221602	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D4	150,500,000.00	150,500,000.00	0.00	100%
5221603	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	147,900,000.00	146,572,500.00	1,327,500.00	99.10%
5221604	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	651,700,000.00	651,700,000.00	0.00	100%
Sub Jumlah		1,015,550,000.00	1,014,222,500.00	1,327,500.00	99.87%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.016.5.2] Koordinasi penyelenggaraan diklat					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	71,105,000.00	69,821,700.00	1,283,300.00	98.20%
Sub Jumlah		72,145,000.00	70,861,700.00	1,283,300.00	98.22%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.018.5.2] Usul Kenaikan Pangkat PNS					

5210105	Honorarium Tim Kegiatan	29,880,000.00	29,880,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	7,428,250.00	7,428,250.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	3,490,500.00	3,490,500.00	0.00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19,287,800.00	19,200,000.00	87,800.00	99.54%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	119,520,000.00	119,468,924.00	51,076.00	99.96%
Sub Jumlah		179,606,550.00	179,467,674.00	138,876.00	99.92%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.019.5.2] Mutasi Pindah PNS					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	26,210,000.00	26,210,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	803,315.00	803,315.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	453,085.00	453,085.00	0.00	100%
5220603	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	454,250.00	454,250.00	0.00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2,904,000.00	2,904,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,130,000.00	19,530,000.00	600,000.00	97.02%
Sub Jumlah		50,954,650.00	50,354,650.00	600,000.00	98.82%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.020.5.2] Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	6,220,000.00	5,895,000.00	325,000.00	94.77%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1,937,000.00	1,937,000.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1,496,250.00	1,496,250.00	0.00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	858,000.00	858,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45,080,000.00	38,722,104.00	6,357,896.00	85.90%
Sub Jumlah		55,591,250.00	48,908,354.00	6,682,896.00	87.98%

[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.021.5.2]					
Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	40,080,000.00	40,080,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	4,556,000.00	4,556,000.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	989,000.00	989,000.00	0.00	100%
5220603	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2,875,000.00	2,875,000.00	0.00	100%
Sub Jumlah		50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	100%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.022.5.2]					
Penyelesaian Pengurusan SK Pemberhentian dengan Hormat dengan Hak Pensiun					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	3,544,242.00	3,544,242.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	3,133,253.00	3,133,253.00	0.00	100%
5220603	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	2,970,450.00	2,967,450.00	3,000.00	99.90%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	131,840,000.00	129,832,900.00	2,007,100.00	98.48%
Sub Jumlah		147,987,945.00	145,977,845.00	2,010,100.00	98.64%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.023.5.2]					
Pelantikan dan Sumpah/ Janji Jabatan Struktural					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	14,870,000.00	14,870,000.00	0.00	100%
5210204	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1,525,000.00	1,525,000.00	0.00	100%
5220210	Belanja Bahan Dekorasi	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100%

5220601	Belanja Penggandaan	750,000.00	750,000.00	0.00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9,590,000.00	9,584,000.00	6,000.00	99.94%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,220,000.00	0.00	8,220,000.00	0.00%
Sub Jumlah		41,390,000.00	33,164,000.00	8,226,000.00	80.13%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.024.5.2] Ujian Dinas					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	5,310,000.00	5,080,000.00	230,000.00	95.67%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1,272,000.00	1,272,000.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	535,250.00	535,250.00	0.00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	884,400.00	884,400.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40,455,000.00	40,333,552.00	121,448.00	99.70%
5221701	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	75.00%
Sub Jumlah		52,456,650.00	51,105,202.00	1,351,448.00	97.42%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.025.5.2] Pemberian Bantuan Ijin Belajar S2					
5221609	Belanja bantuan izin belajar S2	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	100%
5221610	Belanja bantuan izin belajar S3	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	100%
Sub Jumlah		105,000,000.00	105,000,000.00	0.00	100%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.026.5.2] Penyelesaian Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	26,830,000.00	24,630,000.00	2,200,000.00	91.80%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	948,000.00	948,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44,325,000.00	43,468,000.00	857,000.00	98.07%
Sub Jumlah		72,103,000.00	69,046,000.00	3,057,000.00	95.76%

[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.027.5.2]					
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	24,290,000.00	24,290,000.00	0.00	100%
5210204	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1,716,250.00	1,716,250.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	1,592,400.00	1,592,400.00	0.00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	2,520,000.00	2,518,000.00	2,000.00	99.92%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	116,155,000.00	116,154,007.00	100%	100.00 %
Sub Jumlah		149,323,650.00	149,320,657.00	2,993.00	100%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.030.5.2]					
Pelaksanaan Perhimpunan LHKPN					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1,121,250.00	1,121,250.00	0.00	100%
5220210	Belanja Bahan Dekorasi	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	990,000.00	990,000.00	0.00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	450,000.00	450,000.00	0.00	100%
5221102	Belanja Makanan dan Minuman tamu	414,000.00	414,000.00	0.00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7,470,000.00	7,470,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37,025,000.00	35,237,336.00	1,787,664.00	95.17%
Sub Jumlah		49,790,250.00	48,002,586.00	1,787,664.00	96.41%

[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.031.5.2] Inventarisasi dan Pemetaan PNS Potensial di Lingkungan Pem Kab. Sintang					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	23,120,000.00	23,120,000.00	0.00	100%
5210204	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	2,800,000.00	2,795,000.00	5,000.00	99.82%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1,100,000.00	450,000.00	650,000.00	40.91%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	450,000.00	450,000.00	0.00	100%
5220210	Belanja Bahan Dekorasi	1,500,000.00	600,000.00	900,000.00	40.00%
5220310	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	450,000.00	150,000.00	300,000.00	33.33%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	3,275,000.00	2,175,000.00	1,100,000.00	66.41%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19,185,000.00	2,175,000.00	17,010,000.00	11.34%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69,380,000.00	69,380,000.00	0.00	100%
5222103	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	88,000,000.00	0.00	88,000,000.00	0.00%
5222501	Belanja Transportasi	3,500,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	28.57%
5222502	Belanja Akomodasi	3,300,000.00	900,000.00	2,400,000.00	27.27%
Sub Jumlah		252,060,000.00	139,195,000.00	112,865,000.00	55.22%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.033.5.2] Proses Pembinaan dan Penyelesaian Ijin Perceraian					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	26,230,000.00	26,230,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	897,500.00	897,500.00	0.00	100%
Sub Jumlah		27,127,500.00	27,127,500.00	0.00	100%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.034.5.2] Pengolahan dan Penyelesaian Cuti PNS					

5210105	Honorarium Tim Kegiatan	18,650,000.00	18,650,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	495,500.00	495,500.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	990,000.00	990,000.00	0.00	100%
5220603	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	325,000.00	325,000.00	0.00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2,780,000.00	2,780,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26,560,000.00	26,320,000.00	240,000.00	99.10%
Sub Jumlah		49,800,500.00	49,560,500.00	240,000.00	99.52%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.036.5.2] Penyelesaian Taspen, Penyelesaian Pensiun Peg dan Janda					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1,102,300.00	1,102,300.00	0.00	100%
5220103	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	390,000.00	390,000.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1,508,200.00	1,508,200.00	0.00	100%
5220603	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	300,000.00	300,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23,055,000.00	23,054,160.00	840.00	100%
Sub Jumlah		26,355,500.00	26,354,660.00	840.00	100%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.037.5.2] Pengambilan Sumpah/ Janji PNS di Lingkungan Pem Kab. Sintang					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	41,610,000.00	41,430,000.00	180,000.00	99.57%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	975,000.00	975,000.00	0.00	100%
5220108	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	833,750.00	833,750.00	0.00	100%
5220210	Belanja Bahan Dekorasi	530,000.00	530,000.00	0.00	100%

5220601	Belanja Penggandaan	705,000.00	705,000.00	0.00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	540,000.00	540,000.00	0.00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4,830,000.00	4,830,000.00	0.00	100%
Sub Jumlah		51,023,750.00	50,843,750.00	180,000.00	99.65%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.040.5.2] Pengelolaan dan Pengembangan Korpri					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	9,390,000.00	9,390,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1,514,000.00	1,514,000.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	645,000.00	645,000.00	0.00	100%
5220210	Belanja Bahan Dekorasi	300,000.00	300,000.00	0.00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	627,000.00	627,000.00	0.00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	870,000.00	870,000.00	0.00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8,559,000.00	8,559,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48,095,000.00	47,598,800.00	496,200.00	98.97%
Sub Jumlah		70,000,000.00	69,503,800.00	496,200.00	99.29%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.041.5.2] Seleksi terbuka jabatan structural					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	9,330,000.00	9,330,000.00	0.00	100%
5210204	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1,055,700.00	1,055,700.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	450,000.00	450,000.00	0.00	100%
5220210	Belanja Bahan Dekorasi	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100%
5220310	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	52,500,000.00	52,500,000.00	0.00	100%

5220601	Belanja Penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9,450,000.00	9,450,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60,615,000.00	60,577,161.00	37,839.00	99.94%
5221701	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	105,000,000.00	105,000,000.00	0.00	100%
5222501	Belanja Transportasi	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	100%
5222502	Belanja Akomodasi	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	100%
Sub Jumlah		256,900,700.00	256,862,861.00	37,839.00	99.99%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.042.5.2] Rekon database sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) BKN					
5210205	Honorarium Staf Administrasi/Teknis Kegiatan non PNS	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	965,165.00	965,165.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	240,000.00	240,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59,410,000.00	58,374,019.00	1,035,981.00	98.26%
Sub Jumlah		63,365,165.00	62,329,184.00	1,035,981.00	98.37%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.043.5.2] Penyelesaian permasalahan kartu pegawai elektronik					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	649,352.00	649,352.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	240,000.00	240,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34,080,000.00	33,980,279.00	99,721.00	99.71%

Sub Jumlah		37,719,352.00	37,619,631.00	99,721.00	99.74%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.046.5.2] Pembinaan Kode Etik PNS					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	37,598,000.00	34,858,000.00	2,740,000.00	92.71%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	997,000.00	997,000.00	0.00	100%
5220108	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100%
5220210	Belanja Bahan Dekorasi	525,000.00	523,000.00	2,000.00	99.62%
5220312	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00%
5220601	Belanja Penggandaan	330,000.00	330,000.00	0.00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29,320,000.00	28,941,200.00	378,800.00	98.71%
Sub Jumlah		77,670,000.00	73,149,200.00	4,520,800.00	94.18%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.047.5.2] Sinkronisasi data Aparatur Sipil Negara					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	2,048,078.00	2,043,356.00	4,722.00	99.77%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	480,000.00	480,000.00	0.00	100.00 %
5220601	Belanja Penggandaan	759,000.00	759,000.00	0.00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	310,500.00	310,500.00	0.00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75,805,000.00	75,775,351.00	29,649.00	99.96%
Sub Jumlah		83,252,578.00	83,218,207.00	34,371.00	99.96%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.048.5.2] Pengantar Tugas dan Penyerahan SK ASN					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	7,230,000.00	7,210,000.00	20,000.00	99.72%

5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	4,165,000.00	4,165,000.00	0.00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1,518,500.00	1,518,500.00	0.00	100%
5220210	Belanja Bahan Dekorasi	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100%
5220310	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	7,000,000.00	4,200,000.00	2,800,000.00	60.00%
5220601	Belanja Penggandaan	990,000.00	990,000.00	0.00	100%
5220603	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15,255,000.00	15,255,000.00	0.00	100%
Sub Jumlah		54,658,500.00	51,838,500.00	2,820,000.00	94.84%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.049.5.2] Seleksi Penerimaan dan PPPK					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	89,260,000.00	0.00	89,260,000.00	0.00%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	4,685,950.00	0.00	4,685,950.00	0.00%
5220102	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	36,888,000.00	0.00	36,888,000.00	0.00%
5220105	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,233,500.00	0.00	1,233,500.00	0.00%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	3,764,000.00	0.00	3,764,000.00	0.00%
5220210	Belanja Bahan Dekorasi	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00%
5220304	Belanja Jasa Talk Show (Siaran)/Iklan/pengumuman Media	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00%
5220310	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	21,250,000.00	0.00	21,250,000.00	0.00%
5220601	Belanja Penggandaan	2,838,000.00	0.00	2,838,000.00	0.00%
5221004	Belanja Sewa Generator	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00%

5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	89,653,500.00	21,097,500.00	68,556,000.00	23.53%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	78,670,000.00	69,647,578.00	9,022,422.00	88.53%
5222501	Belanja Transportasi	22,900,000.00	0.00	22,900,000.00	0.00%
5222502	Belanja Akomodasi	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00%
5231005	Belanja modal pengadaan alat kantor lainnya	10,000,000.00	9,700,000.00	300,000.00	97.00%
Sub Jumlah		394,982,950.00	100,445,078.00	294,537,872.00	25.43%
[DPPA - 0.4.03.0.4.03.01.00.17.050.5.2] Seleksi Penerimaan CPNS					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	82,030,000.00	64,890,000.00	17,140,000.00	79.11%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	7,633,500.00	7,633,500.00	0.00	100%
5220105	Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	1,110,150.00	0.00	1,110,150.00	0.00%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	4,442,000.00	4,442,000.00	0.00	100%
5220210	Belanja Bahan Dekorasi	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00%
5220304	Belanja Jasa Talk Show (Siaran)/Iklan/pengumuman Media	1,600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	31.25%
5220310	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/ Pembicara/P raktisi	31,450,000.00	0.00	31,450,000.00	0.00%
5220601	Belanja Pengandaan	3,795,000.00	3,795,000.00	0.00	100%
5221004	Belanja Sewa Generator	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	2,622,000.00	2,600,000.00	22,000.00	99.16%
5221102	Belanja Makanan dan Minuman tamu	11,212,500.00	0.00	11,212,500.00	0.00%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	80,475,000.00	56,202,000.00	24,273,000.00	69.84%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	88,365,000.00	87,867,823.00	497,177.00	99.44%

5222501	Belanja Transportasi	41,220,000.00	0.00	41,220,000.00	0.00%
5222502	Belanja Akomodasi	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00%
Sub Jumlah		394,955,150.00	227,930,323.00	167,024,827.00	57.71%
[DPPA - 0.4.05.0.4.03.01.00.24.018.5.2] Pameran pembangunan					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1,081,700.00	995,200.00	86,500.00	92.00%
5220102	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2,100,000.00	1,950,000.00	150,000.00	92.86%
5220104	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	310,000.00	310,000.00	0.00	100%
5220201	Belanja bahan baku pembangunan (swakelola)	9,341,000.00	9,341,000.00	0.00	100%
5220210	Belanja Bahan Dekorasi	2,655,000.00	2,405,000.00	250,000.00	90.58%
5220211	Belanja Bahan Pameran	3,172,300.00	3,142,000.00	30,300.00	99.04%
5220317	Belanja Jasa Tenaga Tukang	5,400,000.00	4,800,000.00	600,000.00	88.89%
5220705	Belanja Sewa tempat Pameran	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	4,293,000.00	4,293,000.00	0.00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9,160,000.00	9,160,000.00	0.00	100%
5222201	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	4,500,000.00	4,425,000.00	75,000.00	98.33%
Sub Jumlah		48,013,000.00	46,821,200.00	1,191,800.00	97.52%
Jumlah Keseluruhan		8,719,548,001.00	8,017,067,859.00	702,480,142.00	91.94%

Sumber : Laporan Keuangan BKPSDM Tahun 2019

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sintang disusun dengan pengolahan data dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2019, penetapan kinerja Tahun 2019 dan pengukuran kinerja tahun 2019 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan LKjIP ini merupakan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan atau capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Sintang sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang ditempuh sehingga mampu mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja sebanyak 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama.

Hasil LKjIP BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dapat terpenuhi dengan predikat **sangat berhasil** dengan prosentase **91,39 %**. Merujuk kepada capaian kinerja tersebut di atas, akuntabilitas kinerja BKPSDM Kabupaten Sintang sesuai dengan harapan, namun dengan pencapaian tersebut merupakan dasar motivasi dalam memacu produktivitas seluruh pegawai aparatur sipil Negara di Lingkungan BKPSDM Kabupaten Sintang untuk memberikan yang

terbaik di masa yang akan datang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Secara periodik hal ini dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan atas pencapaian kinerja yang dianggap masih belum optimal, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai pada tahun anggaran 2019 tersebut.

Demikian LKjIP ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam meningkatkan kinerja BKPSDM Kabupaten Sintang kedepan.

Sintang, Februari 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SINTANG**



PALENTINUS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601216 198509 1 001